

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang mana pulau-pulau membentang dari Sabang hingga Merauke serta lautan mengelilingi pulau-pulau Indonesia. Keadaan Indonesia tersebut menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, hal itu dapat menjadi keuntungan maupun kerugian bagi Negara Indonesia. Keuntungan yang diperoleh akan menunjang tercapainya cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Tercapainya cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi tantangan seluruh elemen, tidak hanya pemerintah namun Warga Negara Indonesia semua diharap dapat berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luasnya Negara Indonesia ini menjadikan adanya pemberian wewenang dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pemberian wewenang ini mengharuskan pemerintah daerah bisa mengelola daerahnya dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial, lingkungan dan urusan - urusan lainnya.

Pembangunan dalam sektor apapun tentu memiliki tujuan masing-masing. Tujuan dari pembangunan yang beraneka ragam tersebut tidak boleh melupakan wujud dari pembangunan yang baik, yang mana wujud pembangunan yang baik yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa

mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, *Report of The World Commission on Environment and Development* (dalam Hidayat, Adji. 2007:43). Ada dua hal penting yang menjadi fokus pembangunan berkelanjutan, yaitu pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestariannya. Pemanfaatan lingkungan hidup pada pembangunan berkelanjutan ini sah saja namun kelestarian dari lingkungan perlu dijaga agar daya dukung lingkungan untuk ke depan tercapai. Pembangunan berkelanjutan akan mencegah adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, selain itu yang dapat mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan yaitu dengan manajemen lingkungan yang tepat. Manajemen lingkungan adalah rangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk pencapaian kualitas lingkungan yang baik.

Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tepat menjadi salah satu unsur dalam manajemen lingkungan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana di dalam UUD RI No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mempunyai pengertian yaitu area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka yang mempunyai peran sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dan daerah terbuka.

Berkaitan mengenai masalah pembangunan dan lingkungan hidup, maka dalam setiap pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang yang dimaksudkan disini yaitu bentuk perencanaan fisik

kota yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan arah pertumbuhan kota. Dalam rangka mengatur penataan dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Indonesia baik dalam lingkup nasional, regional maupun lokal, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur konsep penataan ruang bagi setiap daerah di Indonesia dengan memperhatikan kawasan lingkungan ruang terbuka hijau.

Pengertian penataan ruang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut yang kemudian menjadi landasan untuk pengaturan RTH dalam rangka mewujudkan ruang kawasan yang sehat, indah dan nyaman. RTH pada hakikatnya merupakan salah satu unsur ruang kota yang mempunyai peran penting setara dengan unsur-unsur kota yang lain (Nirwono Joga, 2011: 91). Sedangkan pengertian ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam kawasan perkotaan dimaksudkan agar terjaminnya ketersediaan ruang yang cukup bagi : kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis, kawasan pengendalian air dengan dibangunnya kolam retensi, area berkembangnya keanekaragaman hayati, tempat rekreasi, tempat olahraga masyarakat, tempat pemakaman umum, dan tempat pelindung sumber daya alami, buatan maupun historis. RTH mempunyai berbagai peran yaitu :

penyedia lingkungan udara yang bersih bagi masyarakat sekitar, hal ini tentu akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menjadi tempat kebahagiaan hidup masyarakat atau tempat yang rileks, kemudian menjadi nilai tambah estetika tata kelola lingkungan perkotaan.

Namun realita yang ada sekarang ini masih banyak terdapat wilayah-wilayah di Indonesia yang belum dapat melakukan penataan ruang secara tepat, terlebih dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau. Pembangunan terjadi diberbagai sudut wilayah saat ini memberikan imbas buruk bagi lingkungan. Hadirnya gedung-gedung yang tinggi dan luas tak terasa mulai menyingkirkan keberadaan ruang terbuka hijau. Pembangunan minimarket, supermarket, gedung perkantoran, gedung serta gudang pabrik dan lain-lainnya banyak membabat habis lahan kota karena harus mendukung fasilitas perkotaan, mulai dari kemajuan teknologi, industri dan transportasi. Riskannya pembangunan-pembangunan yang dilakukan tersebut selain menyita lahan yang bisa dimanfaatkan untuk RTH, juga menganggap RTH ini sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Anggapan tersebut tentu tidak tepat, perlunya kesadaran jika tingginya gedung-gedung tidaklah menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kota karena pada dasarnya semakin banyak tinggi gedung-gedung dan semakin banyak pula kendaraan, menandakan jika polusi atau pencemaran lingkungan dan pemanasan global semakin meningkat.

Melihat adanya permasalahan mengenai diabaikannya RTH, beberapa wilayah di Indonesia mengeluarkan aturan guna menunjang keberlangsungan dari RTH. Provinsi Jawa Tengah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau, di dalamnya

dijelaskan jika Pengendalian RTH dilaksanakan di semua Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Setiap Kabupaten/Kota wajib memenuhi luasan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH Privat dari luas wilayah kota/ perkotaan. Luasan RTH yang sudah dipenuhi tidak dapat dialihfungsikan sehingga akan mengurangi luas persentase RTH terkait. Kabupaten Kudus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No.16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus 2012-2032, di dalamnya telah mengatur mengenai RTH yang mana proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan harus dipenuhi. Secara rinci mengenai penataan ruang dan juga RTH akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang RDTR Kawasan Perkotaan.

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten Kudus pada sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, pada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, pada sebelah selatan berbatasan Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan, kemudian disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Kabupaten Kudus mempunyai luas wilayah sebesar 425,15 Km², berjumlah penduduk 823.650 Jiwa dan mempunyai wilayah administrasi 9 Kecamatan, 9 Kelurahan, 123 Desa (<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/33/name/jawa-tengah/detail/3319/kudus>). Diunduh pada 23 November 2018 pukul 21.15 WIB.

Ruang Terbuka Hijau terbagi menjadi dua yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. Ruang Terbuka Hijau Publik yaitu Ruang Terbuka Hijau yang menjadi kewajiban pengelolaannya adalah pemerintah. RTH

Publik di Kabupaten Kudus tidak hanya dibangun oleh satu dinas saja, namun dibangun oleh berbagai dinas seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Kudus yang membangun Taman Balai Jagong, kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus yang membangun Taman Krida, Dinas Pengelolaan Pasar dan Perdagangan Kabupaten Kudus yang membangun Taman Menara Kudus.

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus menjelaskan jika urusan RTH Publik merupakan wewenang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Sedangkan Ruang Terbuka Hijau Privat yaitu Ruang Terbuka Hijau yang kewajiban pengelolaannya dari masyarakat atau swasta masing-masing. Pemerintah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan Manajemen RTH Publik masih menghadapi permasalahan-permasalahan. Masalah pertama yang dialami yaitu adalah belum tercapainya jumlah minimal persentase luas RTH Publik, sebagaimana dalam peraturan yang berlaku mengatur kawasan perkotaan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) RTH dari luas kawasan perkotaan. Di dalam 30% itu sendiri terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Data presentasi RTH di kabupaten Kudus dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun peningkatan yang ada sangat kecil dan pada akhir-akhir ini (tahun 2017 hingga tahun 2018) sama sekali tidak ada penambahan RTH Publik. Tidak adanya penambahan ini menandakan jika Manajemen RTH Publik Kabupaten Kudus

belum maksimal apalagi persentase yang ada masih sangat jauh untuk mencapai persentase yang telah ditetapkan oleh peraturan.

Tabel 1.3
Luas RTH Publik Eksisting di Perkotaan Kabupaten Kudus Tahun 2014-2018
(dalam hektar)

RTH Publik	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Luas RTH Publik	841,95	841,95	843,145	845,14	845,14
Persentase RTH Publik %	8,13	8,13	8,15	8,16	8,16

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus dan Hasil Olah Data di Lapangan

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat jika persentase RTH Publik Kabupaten Kudus masih belum terpenuhi sebagaimana Pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 UU No. 26 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, kemudian untuk proporsi RTH Publik pada wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota. Namun hingga saat ini, pemenuhan proporsi lahan RTH Publik di Kabupaten Kudus khususnya di wilayah perkotaan belum dapat terealisasi dengan sempurna karena baru mencapai persentase 8,16%.

Selain persentase luasan RTH Publik yang masih kurang, di lapangan juga ditemukan kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan RTH di Kabupaten Kudus yang masih perlu dimaksimalkan. Pembangunan RTH yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat dan sesuai fungsinya, misal dalam pembangunan RTH memiliki fungsi untuk dimanfaatkan rekreasi, interaksi sosial, hingga sebagai tempat

peningkatan ekonomi. Namun yang disayangkan masih adanya beberapa RTH yang terjadi alih fungsi yaitu beberapa taman dipakai untuk kegiatan yang tidak semestinya hingga berbuat amoral.

Selanjutnya masih belum optimalnya komunikasi dengan masyarakat oleh pemerintah mengenai RTH Publik. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan sosialisasi RTH Publik melalui Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Kudus yang dapat diakses melalui *website* <http://gis.kuduskab.go.id/> yang berisi mengenai RTH Publik. Namun isi dari Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Kudus tersebut belum bisa optimal menjadi media komunikasi/sosialisasi pemerintah, karena isi yang dimuat masih sedikit dan kurang adanya informasi yang memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai RTH Publik. Melihat masalah tersebut tentu perlu adanya sosialisasi langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kudus untuk memberikan informasi mengenai pentingnya RTH Publik di Kabupaten Kudus sehingga akan berdampak pada peningkatan kuantitas maupun kualitas dari RTH Publik.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis pakai sebagai acuan, penelitian mengenai Manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik masih jarang ditemukan. Untuk fokus penelitian mengenai “Manajemen” Ruang Terbuka Hijau Publik di daerah Kabupaten Kudus pun belum penulis temukan. Penelitian terdahulu mengenai Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus hanyalah berkisar pada “komitmen pemimpin terhadap Ruang Terbuka Hijau, kemudian evaluasi Ruang Terbuka Hijau terhadap pertumbuhan penduduk, lalu tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di kudus”

Dari beberapa masalah diatas, penulis melakukan penelitian mengenai Manajemen RTH Publik oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus. Hal ini menjadikan penulis mengangkat Judul “**MANAJEMEN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) KABUPATEN KUDUS** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan dari latar belakang, ada 2 ruang lingkup permasalahan yang diajukan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini

1. Bagaimana manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus?
2. Apa faktor yang mendorong serta menghambat dalam manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui fakta dan menjawab permasalahan yang ada dirumusan masalah

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus

2. Untuk mengidentifikasi faktor yang mendorong serta menghambat dalam manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus

1.4 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan sebagai pemenuhan skripsi, penelitian tentang anajemen Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus ini juga mempunyai kegunaan penelitian lain yang di antaranya sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
 - a) Setelah mendapatkan pembelajaran di perkuliahan maka melalui penelitian ini, buah pembelajaran di perkuliahan dapat dijadikan sebagai ajang penerapan teori - teori dan praktik.
 - b) Melalui penelitian ini diharapkan mendapat wawasan tambahan mengenai manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik
2. Bagi Kalangan Akademisi
 - a) Sebagai tambahan bukti empiris mengenai penerapan manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik
 - b) Sebagai bahan kajian pustaka bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui Manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik dan dapat dikembangkan oleh akademisi lain yang tertarik dengan topik yang sama sehingga ke depan penelitian dapat terus dikembangkan menjadi lebih baik.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai input bahan pertimbangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan Manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik yang lebih baik.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penulis, Tahun	Hasil
1	Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pertumbuhan Penduduk Berbasis Spasial Di Kabupaten Kudus Sandy Yudistira Mahardika, 2015	Penyediaan RTH di wilayah perkotaan khususnya untuk wilayah perkotaan Kudus memang sedikit mengalami kesulitan dikarenakan sawah yang lebih mendominasi di perkotaan Kudus itu sendiri. Secara kuantitatif berkurangnya RTH karena perubahan fungsi lahan. Untuk mengetahui perubahan fungsi lahan tersebut dapat melalui beberapa cara pemanfaatan data citra satelit. Berdasarkan pengolahan citra resolusi tinggi atau Google Earth tahun 2013, didapatkan luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kudus tahun 2013 sebesar 5.395,953 Ha atau sekitar 12,04% dari total luas wilayah Kabupaten Kudus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas Ruang Terbuka Hijau belum memenuhi jumlah yang ditentukan dalam RTRW Kabupaten Kudus sebesar 30% dari total luas wilayah Kabupaten Kudus.
2	Komitmen Pemimpin dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus Intan Istiqomah, 2016	Komitmen pemimpin Kudus dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau masih belum optimal. Ditunjukkan dari indikator komitmen pemimpin yaitu sikap dalam memberi teladan, peran pengambilan keputusan dan janji untuk membuat peraturan daerah masih belum optimal. Selain itu, ditemukan bahwa faktor penghambat dalam komitmen pemimpin berupa komunikasi pemberian informasi kepada masyarakat belum efektif, cara pemimpin beradaptasi, dan sumber daya yakni kompetenai pegawai serta peralatan masih belum optimal. Meskipun ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan oleh pemimpin daerah. Saran yang diberikan yaitu pemberian teladan kepada masyarakat, pemimpin daerah mencari lahan yang tidak terpakai, dan kompetensi pegawai yang ditingkatkan melalui diklat dan seminar,

		lalu pemimpin membuat Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau.
3	Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus Achmad Mukafi, 2013	Keberadaan RTH di Kota Kudus terdesak oleh semakin berkembangnya alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun, terlebih alih fungsi sebagai pembangunan non hijau. Padahal sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 tahun 2008 mensyaratkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan minimal harus terpenuhi sebesar 20% dari luas total wilayah kota, hal tersebut juga disebutkan dalam UU No. 26 tahun 2007.
4	Community Perception on Public Open Space and Quality of Life in Medan, Indonesia Achmad Delianur Nasution, 2014	Dua jenis data yang dikumpulkan. Yang pertama, aspek fisik dan aktivitas Ruang Terbuka Publik, dikumpulkan melalui bidang survei dan observasi. Data memberikan informasi tentang kualitas Ruang Terbuka Publik, dan seberapa intensif orang menggunakannya. Yang kedua, persepsi masyarakat tentang Ruang Terbuka Publik, dikumpulkan melalui wawancara berdasarkan kuesioner. Hasilnya menunjukkan bahwa orang hampir tidak membutuhkan Ruang Terbuka Publik tidak peduli seberapa buruk kualitasnya. Kebijakan perencanaan kota harus menempatkan publik terbuka sebagai salah satu prioritas pembangunan, dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik, baik dalam skala perkotaan dan lingkungan.
5	Manajemen Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang Ferdinand Harianja, 2017	Mengenai permasalahan yang dihadapi dalam Manajemen Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang adalah tidak adanya perencanaan, pengorganisasian dan mobilisasi yang baik di bidang sumber daya manusia. Ini Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang yang termasuk perencanaan, pengorganisasian, penerahan dan pengawasan serta mengetahui hambatannya dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tata Ruang Terbuka Hijau belum optimal. Hal ini karena masih ada masalah dalam perencanaan di mana kekurangan tenaga ahli-ahli lanskap sehingga tanpa lanskap ahli pembangunan taman nasional kurang memadai, pengorganisasian di mana penempatan pegawai masih kurang sesuai dengan pendidikan latar belakang dan posisi adalah diemban dan mobilisasi yang merupakan potensi pengembangan bawahannya masih jarang dilakukan. Rekomendasi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki Manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik di Indonesia Kota Semarang merencanakan dengan mencari ahli perencanaan lanskap kebun pengembangan, pengorganisasian dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang berkaitan dengan manusia masalah sumber daya dan rekrutmen karyawan sesuai dengan kompetensi,

		pengembangan potensi karyawan melalui penyediaan kesempatan pendidikan.
6	<p>Pelaksanaan Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Metro</p> <p>Iguh Purdani Putra, 2014</p>	<p>Tulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pentingnya fungsi dari Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro yang ditetapkan bahwa setiap kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau minimal 30 persen dari luas wilayah kotanya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode dengan pendekatan normatif empiris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kota Metro saat ini masih kurang dari 30% dari luas seluruh wilayah Kota Metro, meski upaya pemerintah seperti penyuluhan, pembinaan, pengawasan penertiban, sarana prasarana dan menggerakkan peran masyarakat untuk Ruang Terbuka Hijau sudah dilakukan tetapi masih juga belum tercapai. Faktanya manfaat Ruang Terbuka Hijau masih disalah gunakan oleh para pedagang kaki lima untuk berdagang di area Ruang Terbuka Hijau sehingga merusak area tersebut. Dan juga minimnya kesadaran akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau untuk kehidupan di perkotaan. Selain itu masih banyak faktor-faktor penghambat lainnya seperti perilaku merusak lingkungan hidup, konsumsi yang berlebihan atas sumber daya alam, egosentrisme, dan perebutan kepentingan.</p>
7	<p>Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Publik (Studi Di Taman Merdeka Kota Metro)</p> <p>Eva Etiningsih, 2016</p>	<p>Taman Merdeka memiliki fungsi ekonomi, fungsi wahana interaksi, fungsi lingkungan, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, fungsi transit, dan fungsi kesehatan. Fungsi ekonomi ditunjukkan dengan banyaknya pedagang barang maupun jasa yang beroperasi di Taman Merdeka. Fungsi wahana interaksi ditunjukkan dengan banyaknya interaksi antarpengguna taman. Taman Merdeka dengan vegetasinya berperan sebagai paru-paru kota yang difungsikan sebagai fungsi lingkungan. Fungsi rekreasi ditunjukkan dengan dijadikannya taman sebagai tempat untuk menyegarkan kembali fisik maupun psikis. Fungsi pendidikan disajikan dengan adanya pemisahan tempat sampah dan pemberian papan nama tanaman. Fungsi kesehatan yang disuguhkan Taman Merdeka yaitu dengan adanya jalur refleksi di dalam area taman.</p>
8	<p><i>Urban Green Space, Public Health, And Environmental Justice: The Challenge Of Making Cities 'Just Green Enough</i></p> <p>Jennifer R. Wolch dari University of California, 2014</p>	<p>Jurnal ini mengulas literatur Anglo-Amerika tentang Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, terutama taman, dan membandingkan usaha dengan kota-kota AS dan China yang hijau. Sebagian besar penelitian mengungkapkan bahwa distribusi ruang semacam itu seringkali secara tidak proporsional menguntungkan sebagian besar masyarakat Putih dan lebih banyak lagi. Akses terhadap Ruang Terbuka Hijau semakin diakui sebagai isu keadilan lingkungan. Banyak kota di AS telah menerapkan strategi untuk meningkatkan pasokan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, terutama di lingkungan yang miskin taman. Strategi mencakup penghijauan sisa-sisa lahan perkotaan dan penggunaan kembali infrastruktur transportasi yang sudah usang atau kurang dimanfaatkan. Strategi serupa dipekerjakan di kota-kota di China di mana ada lebih banyak kontrol negara</p>

		terhadap pasokan lahan namun insentif pasar serupa untuk penghijauan perkotaan. Namun, di kedua konteks itu, strategi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan mungkin paradoks. Sementara penciptaan Ruang Terbuka Hijau baru untuk mengatasi masalah keadilan lingkungan dapat membuat lingkungan lebih sehat dan lebih estetik, juga dapat meningkatkan biaya perumahan dan nilai properti. Pada akhirnya, hal ini dapat menyebabkan rasa sakit dan perpindahan penduduk sangat strategi Ruang Terbuka Hijau dirancang untuk mendapatkan keuntungan. Perencana, perancang, dan ahli ekologi perkotaan, perlu fokus pada strategi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yang 'cukup hijau' dan yang secara eksplisit melindungi kelestarian sosial dan ekologi.
9	<i>Emerging Trend Of Urban Green Space Research And The Implications For Safeguarding Biodiversity: A Viewpoint</i> Gairola, S. dan M. S. Noresah, 2010	Urbanisasi yang cepat sangat mengubah pola spasial tanah perkotaan digunakan di seluruh dunia. Akibatnya, kerugian yang diakibatkan dari Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di tingkat lokal sampai global terus berlanjut hingga mengubah ekosistem perkotaan. Penelitian terbaru mengenai aspek ini menekankan pentingnya Ruang Terbuka Hijau Perkotaan. Begitu juga kerugian-kerugian yang ada karena pertumbuhan kota yang cepat. Pentingnya layanan ekosistem yang disediakan oleh ruang terbuka hijau untuk kesejahteraan manusia mendapatkan pengakuan dan telah disorot oleh sebagian besar studi terbaru. Di dalam komunikasi singkat dibahas kecenderungan munculnya penelitian Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dan implikasinya menjaga keanekaragaman hayati sejalan dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa 2010 menjadi Tahun Internasional Keanekaragaman hayati.
10	<i>Urban Green Spaces and an Integrative Approach to Sustainable Environment</i> Shah Md. Atiqul Haq, 2011	Menjelaskan manfaat dan tantangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan berdasarkan diskusi kritis hasil studi dari berbagai studi di berbagai kota. Peran penting yang dimainkan oleh Ruang Terbuka Hijau adalah sosial, ekonomi, budaya dan aspek lingkungan pembangunan berkelanjutan. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan bisa menjadi alat yang komprehensif untuk perlindungan jangka panjang lingkungan keberlanjutan melalui memperbaiki kualitas hidup dan udara kualitas, meningkat dengan memiliki nilai-nilai karena untuk mereka kemudahan dan estetis karakteristik, dan mengurangi itu energi biaya dari pendinginan bangunan. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan juga bisa menyediakan jasa ekosistem di Indonesia yaitu itu rekreasi dan relaksasi fasilitas. Untuk memastikan itu banyak peran dimainkan oleh Ruang Terbuka Hijau, perbaikan kualitatif dan distribusi dari Ruang Terbuka Hijau baik di perkotaan maupun daerah harus dimasukkan pada pembangunan lingkungan keberlanjutan dengan rencana tertentu. Untuk melakukan ini, pendekatan terpadu mengenai perencanaan, pemantauan, merancang dan memelihara dari Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dibutuhkan untuk memperbaiki itu lingkungan keberlanjutan di kota di Indonesia.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis tidak serta merta menulis tanpa arah.

Penulisan penelitian ini dilakukan berdasarkan acuan beberapa penelitian terdahulu

yang diambil skripsi maupun dari jurnal nasional serta jurnal internasional. Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan, bahwa Ruang Terbuka Hijau memiliki manfaat yang sangat banyak bagi lingkungan maupun manusia, selain sebagai penyeimbang lingkungan dari semakin banyaknya pembangunan maupun aktivitas di kawasan perkotaan, selain itu juga mempunyai fungsi rekreasi dan lain-lain. Melihat manfaat Ruang Terbuka Hijau yang sangat penting tersebut diperlukan adanya kawasan Ruang Terbuka Hijau di tiap daerah. Dalam mewujudkan Kawasan Ruang Terbuka Hijau ini, pemerintah telah mengatur jika RTH memenuhi proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang mana 20% untuk RTH Publik dan 10%nya untuk RTH Privat. Dalam pencapaian proporsi paling sedikit RTH Publik 20% diperlukan adanya berbagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau Publik. Manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik diperlukan guna mencapai proporsi paling sedikit Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan.

Pada penelitian pertama yang menjadi acuan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sandy Yudistira Mahardika (2015) mahasiswa Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro dalam jurnalnya yang berjudul “Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pertumbuhan Penduduk Berbasis Spasial Di Kabupaten Kudus” menyampaikan hasil penelitiannya bahwa penyediaan RTH di wilayah perkotaan khususnya untuk wilayah perkotaan Kudus memang sedikit mengalami kesulitan dikarenakan sawah yang lebih mendominasi di perkotaan Kudus itu sendiri. Secara kuantitatif berkurangnya RTH karena perubahan fungsi

lahan. Untuk mengetahui perubahan fungsi lahan tersebut dapat melalui beberapa cara pemanfaatan data citra satelit. Berdasarkan pengolahan citra resolusi tinggi atau Google Earth tahun 2013, didapatkan luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kudus tahun 2013 sebesar 5.395,953 Ha atau sekitar 12,04% dari total luas wilayah Kabupaten Kudus. Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa luas Ruang Terbuka Hijau belum memenuhi jumlah yang ditentukan dalam RTRW Kabupaten Kudus sebesar 30% dari total luas wilayah Kabupaten Kudus. Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk dan sampel prediksi pertumbuhan penduduk mulai tahun 2013 hingga tahun 2023, didapatkan luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus belum memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau secara merata setiap kecamatannya.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu jurnal tahun 2016 yang berjudul “Komitmen Pemimpin dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus” oleh Intan Istiqomah mahasiswi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro menuliskan jika pembangunan fisik kota, pertumbuhan penduduk serta berbagai aktivitas kota menyebabkan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau. Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kudus yang masih 8% membutuhkan peran pemangku kepentingan berupa komitmen pemimpin untuk mengembangkan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui komitmen pemimpin daerah dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dan faktor penghambat komitmen pemimpin dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen pemimpin Kudus dalam

mengembangkan Ruang Terbuka Hijau masih belum optimal. Ditunjukkan dari indikator komitmen pemimpin yaitu sikap dalam memberi teladan, peran pengambilan keputusan dan janji untuk membuat Peraturan Daerah masih belum optimal. Selain itu, ditemukan bahwa faktor penghambat dalam komitmen pemimpin berupa komunikasi pemberian informasi kepada masyarakat belum efektif, cara pemimpin beradaptasi, dan sumber daya yakni kompetensi pegawai serta peralatan masih belum optimal. Meskipun ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan oleh pemimpin daerah. Saran yang diberikan yaitu pemberian teladan kepada masyarakat, pemimpin daerah mencari lahan yang tidak terpakai, dan kompetensi pegawai yang ditingkatkan melalui ac dan seminar, lalu pemimpin membuat peraturan daerah tentang Ruang Terbuka Hijau.

Selanjutnya yang ketiga yaitu penelitian tahun 2013 oleh Achmad Mukafi mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas teknik, Universitas Negeri Semarang tentang ” Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Kudus”. Isi penelitian ini menerangkan jika keberadaan RTH di Kota Kudus terdesak oleh semakin berkembangnya alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun, terlebih alih fungsi sebagai pembangunan non hijau. Padahal sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 tahun 2008 mensyaratkan bahwa ruang terbuka hijau publik kawasan perkotaan minimal harus terpenuhi sebesar 20% dari luas total wilayah kota. Selain itu disebutkan juga dalam UU No. 26 tahun 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan survey instansional, survey lapangan, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah

berdasarkan luas wilayah. Hasil penelitian yang di dapat adalah, berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari instansi dan dinas terkait menyebutkan bahwa RTH publik eksisting di Kota Kudus sebesar $\pm 75,16$ Ha (0,74% dari luas wilayah Kota Kudus). Namun dari hasil survei lapangan didapatkan luas RTH publik eksisting adalah $\pm 286,41$ Ha (2,83% dari luas wilayah Kota Kudus). Terdapat selisih sebesar 211,25 Ha (2,08%) antara data sekunder dengan data di lapangan. Beberapa RTH di Kota Kudus sangat potensial namun pemanfaatannya belum maksimal, salah satunya taman kota, hutan kota, jalur hijau dan pemakaman. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Luas RTH publik eksisting Kota Kudus berdasarkan data sekunder $\pm 75,16$ Ha, dan dari identifikasi di lapangan sebesar $\pm 286,41$ Ha. (2) Terdapat selisih luasan RTH publik Kota Kudus antara data sekunder dengan hasil identifikasi lapangan sebesar $\pm 211,25$ Ha. (3) Mengacu pada Permen PU No.05 tahun 2008 dan UU No.26 tahun 2007 yang mensyaratkan RTH publik minimal 20% dari wilayah kota, maka Kota Kudus masih membutuhkan lahan terbuka $\pm 1.470,89$ Ha (17,17% dari luas Kota Kudus). (4) Pemanfaatan RTH potensial secara maksimal akan menjadikan kualitas RTH Publik di Kota Kudus semakin baik.

Penelitian terdahulu keempat yaitu jurnal dengan judul "*Community Perception on Public Open Space and Quality of Life in Medan, Indonesia*", Oleh Achmad Delianur Nasution pada tahun 2014. Isi penelitian ini hendak mencari kesamaan atau perbedaan antara 'standar kualitas' ruang terbuka publik dari persepsi pengguna dibandingkan dengan yang ada di negara maju? Seberapa intensif orang menggunakan ruang terbuka publik? Apa faktor dominan ruang terbuka publik yang dirasakan orang? Apakah ruang terbuka publik masih terkait dengan kualitas

hidup masyarakat di Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah orang masih membutuhkan ruang terbuka publik untuk menjaga kualitas hidup mereka. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dalam perencanaan kota, terutama dalam perhatian ruang terbuka publik, sebagai bagian dari pembangunan dalam mencapai kualitas hidup masyarakat perkotaan. Hasil penelitian, dengan melihat kualitas fisik ruang terbuka publik yang rendah dan ruang publik yang diprivatisasi dengan cepat dan berkualitas tinggi di Medan, masyarakat memandang ruang terbuka publik dengan baik dan terus menggunakannya secara intensif. Ini menunjukkan bahwa orang hampir tidak membutuhkan ruang terbuka publik tidak peduli seberapa buruk kualitasnya. Bagaimanapun, penelitian ini menemukan bahwa beberapa faktor ruang terbuka publik memiliki korelasi kuat dengan persepsi ruang terbuka publik. Dengan demikian, di kota negara berkembang seperti Medan, Indonesia, peningkatan faktor ruang terbuka publik akan membuat persepsi yang lebih baik tentang ruang terbuka publik dan di samping kualitas hidup. Kebijakan perencanaan kota harus menempatkan publik terbuka sebagai salah satu prioritas pembangunan, dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik, baik dalam skala perkotaan dan lingkungan.

Penelitian terdahulu kelima yaitu Jurnal “Manajemen Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang” oleh Ferdinand Harianja tahun 2017. Yang mana berisi mengenai permasalahan yang dihadapi dalam manajemen ruang terbuka hijau di Kota Semarang adalah tidak adanya perencanaan, pengorganisasian dan mobilisasi yang baik di bidang sumber daya manusia. Ini Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Semarang yang termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengerahan dan pengawasan serta mengetahui hambatannya dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tata Ruang Terbuka Hijau belum optimal. Hal ini karena masih ada masalah dalam perencanaan di mana kekurangan tenaga ahli ahli lanscape sehingga tanpa lanskap ahli pembangunan taman nasional kurang memadai, Pengorganisasian di mana penempatan pegawai masih kurang sesuai dengan pendidikan Latar belakang dan posisi adalah diemban dan mobilisasi yang merupakan potensi pengembangan bawahannya masih jarang dilakukan. Rekomendasi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki Manajemen Ruang Terbuka Hijau di Indonesia Kota Semarang merencanakan dengan mencari ahli perencanaan lanskap kebun pengembangan, pengorganisasian dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang berkaitan dengan manusia masalah sumber daya dan rekrutmen karyawan sesuai dengan kompetensi, pengembangan potensi karyawan melalui penyediaan kesempatan pendidikan.

Penelitian terdahulu keenam yaitu Jurnal “Pelaksanaan Pengaturan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Metro” oleh Iguh Purdani Putra tahun 2014. Tulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana Pentingnya fungsi dari Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro yang ditetapkan bahwa setiap kota harus memiliki Ruang Terbuka

Hijau minimal 30 persen dari luas wilayah kotanya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode dengan pendekatan normatif empiris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kota Metro saat ini masih kurang dari 30% dari luas seluruh wilayah Kota Metro, meski upaya pemerintah seperti penyuluhan, pembinaan, pengawasan penertiban, sarana prasarana dan menggerakkan peran masyarakat untuk Ruang Terbuka Hijau sudah dilakukan tetapi masih juga belum tercapai. Faktanya manfaat Ruang Terbuka Hijau masih disalahgunakan oleh para pedagang kaki lima untuk berdagang di area Ruang Terbuka Hijau sehingga merusak area tersebut. Dan juga minimnya kesadaran akan pentingnya ruang terbuka hijau untuk kehidupan di perkotaan. Selain itu masih banyak faktor-faktor penghambat lainnya seperti perilaku merusak lingkungan hidup, konsumsi yang berlebihan atas sumber daya alam, egosentrisme, dan perebutan kepentingan.

Penelitian terdahulu yang ketujuh yaitu penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Publik (Studi Di Taman Merdeka Kota Metro)” oleh Eva Etiningsih mahasiswi Sosiologi, FISIP, Universitas Lampung. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana fungsi Taman Merdeka bagi masyarakat sebagai ruang publik di Kota Metro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini berlokasi di Taman Merdeka Kota Metro. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Taman Merdeka memiliki fungsi ekonomi, fungsi wahana interaksi, fungsi lingkungan, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, fungsi

transit, dan fungsi kesehatan. Fungsi ekonomi ditunjukkan dengan banyaknya pedagang barang maupun jasa yang beroperasi di Taman Merdeka. Fungsi wahana interaksi ditunjukkan dengan banyaknya interaksi antar pengguna taman. Taman Merdeka dengan vegetasinya berperan sebagai paru-paru kota yang difungsikan sebagai fungsi lingkungan. Fungsi rekreasi ditunjukkan dengan dijadikannya taman sebagai tempat untuk menyegarkan kembali fisik maupun psikis. Fungsi pendidikan disajikan dengan adanya pemisahan tempat sampah dan pemberian papan nama tanaman. Fungsi kesehatan yang disuguhkan Taman Merdeka yaitu dengan adanya jalur refleksi di dalam area taman.

Penelitian terdahulu kedelapan selanjutnya yaitu Jurnal dengan judul *“Urban Green Space, Public Health, And Environmental Justice: The Challenge Of Making Cities ‘Just Green Enough’* oleh Jennifer R. Wolch dari University of California, tahun 2014. Jurnal ini mengulas literatur Anglo-Amerika tentang Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, terutama taman, dan membandingkan usaha dengan kota-kota AS dan China yang hijau. Sebagian besar penelitian mengungkapkan bahwa distribusi ruang semacam itu seringkali secara tidak proporsional menguntungkan sebagian besar masyarakat Putih dan lebih banyak lagi. Akses terhadap Ruang Terbuka Hijau semakin diakui sebagai isu keadilan lingkungan. Banyak kota di AS telah menerapkan strategi untuk meningkatkan pasokan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, terutama di lingkungan yang miskin taman. Strategi mencakup penghijauan sisa-sisa lahan perkotaan dan penggunaan kembali infrastruktur transportasi yang sudah usang atau kurang dimanfaatkan. Strategi serupa dipekerjakan di kota-kota di China di mana ada lebih banyak kontrol negara

terhadap pasokan lahan namun insentif pasar serupa untuk penghijauan perkotaan. Namun, di kedua konteks itu, strategi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan mungkin paradox. sementara penciptaan Ruang Terbuka Hijau baru untuk mengatasi masalah keadilan lingkungan dapat membuat lingkungan lebih sehat dan lebih estetis, juga dapat meningkatkan biaya perumahan dan nilai properti. Pada akhirnya, hal ini dapat menyebabkan rasa sakit dan perpindahan penduduk sangat strategi Ruang Terbuka Hijau dirancang untuk mendapatkan keuntungan. Perencana, perancang, dan ahli ekologi perkotaan perlu fokus pada strategi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yang 'cukup hijau' dan yang secara eksplisit melindungi kelestarian sosial dan ekologi.

Penelitian terdahulu yang kesembilan yaitu jurnal dengan judul “*Emerging Trend Of Urban Green Space Research And The Implications For Safeguarding Biodiversity: A Viewpoint*” oleh Gairola, S. dan M. S. Noresah tahun 2010 yang berisi seperti berikut : urbanisasi yang cepat sangat mengubah pola spasial tanah perkotaan gunakan di seluruh dunia. Akibatnya, kerugian yang diakibatkan dari Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di tingkat lokal sampai global terus berlanjut hingga mengubah ekosistem perkotaan. Penelitian terbaru mengenai aspek ini menekankan pentingnya Ruang Terbuka Hijau Perkotaan. Begitu juga kerugian-kerugian yang ada karena pertumbuhan kota yang cepat. Pentingnya layanan ekosistem yang disediakan oleh ruang terbuka hijau untuk kesejahteraan manusia mendapatkan pengakuan dan telah disorot oleh sebagian besar studi terbaru. Di dalam komunikasi singkat dibahas kecenderungan munculnya penelitian Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dan implikasinya menjaga keanekaragaman hayati sejalan

dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa 2010 menjadi Tahun Internasional Keanekaragaman hayati.

Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu Jurnal dengan judul "*Urban Green Spaces and an Integrative Approach to Sustainable Environment*" Oleh Shah Md. Atiqul Haq tahun 2011 yang menjelaskan manfaat dan tantangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan berdasarkan diskusi kritis hasil studi dari berbagai studi di berbagai kota. Peran penting yang dimainkan oleh Ruang Terbuka Hijau Perkotaan adalah sosial, ekonomi, budaya dan aspek lingkungan pembangunan berkelanjutan. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan bisa menjadi alat yang komprehensif untuk perlindungan jangka panjang lingkungan keberlanjutan melalui memperbaiki kualitas hidup dan udara kualitas, meningkat dengan memiliki nilai-nilai karena untuk mereka kemudahan dan estetis karakteristik, dan mengurangi itu energi biaya dari pendinginan bangunan. Perkotaan hijau ruang Juga bisa menyediakan jasa ekosistem di Indonesia yaitu itu rekreasi dan relaksasi fasilitas. Untuk memastikan itu banyak peran dimainkan oleh ruang terbuka hijau, perbaikan kualitatif dan distribusi dari ruang terbuka hijau baik di perkotaan maupun daerah harus dimasukkan pada pembangunan lingkungan keberlanjutan dengan scedule tertentu. Untuk melakukan ini, sebuah terpadu pendekatan mengenai itu perencanaan, pemantauan, merancang dan memelihara dari perkotaan hijau ruang Dibutuhkan untuk memperbaiki itu lingkungan keberlanjutan di kota di Indonesia.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis pakai sebagai acuan, penelitian mengenai Manajemen Ruang Terbuka Hijau yang masih jarang ditemukan. Untuk fokus penelitian mengenai Manajemen Ruang Terbuka Hijau

Publik di daerah Kabupaten Kudus pun belum penulis temukan. Penelitian terdahulu mengenai Ruang Terbuka Hijau di kabupaten kudus hanyalah berkisar pada “komitmen pemimpin terhadap Ruang Terbuka Hijau, kemudian evaluasi Ruang Terbuka Hijau terhadap pertumbuhan penduduk, lalu tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di kudus”. Penulis dalam melakukan penelitian akan menggunakan fungsi manajemen dalam melihat Manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Dinas PKPLH Kabupaten Kudus. Fungsi Manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik yang diterapkan ada 4 fungsi manajemen, hal ini diharapkan dapat menjadikan sudut pandang lain mengenai penelitian Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Kudus dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Fungsi manajemen yang dimaksud diatas yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Fungsi ini juga menjadi aspek penting untuk tercapainya sebuah administrasi publik yang baik.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi mempunyai 3 point penting yaitu “kerjasama, banyak orang, dan untuk mencapai tujuan bersama”. Ketiga point tersebut merupakan arti dari administrasi secara luas. Sedangkan arti dari administrasi secara sempit yaitu administrasi sebagai wujud dari tata usaha. Sedangkan Istilah publik berasal dari bahasa Inggris yaitu *public*, *public* disini mempunyai arti umum, masyarakat atau negara.

Administrasi publik menurut Pradju Atmosudirjo (Inu K, 2006: 24) adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan – tujuan yang bersifat kenegaraan.

Chandler dan Plano (Pasolong, 2010: 7), mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan – keputusan dalam kebijakan publik.

Administrasi publik menurut Dwight Waldo (Pasolong, 2010: 8), adalah manajemen dan organisasi dari manusia – manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan.

Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Louis W. Koenig (Pasolong, 2010: 7), mengatakan administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan politiknya.

Berdasarkan beberapa definisi tokoh diatas maka dapat dirangkumkan sederhana mengenai administrasi publik sebagai bentuk kerjasama beberapa orang yang terorganisir untuk tercapainya kebutuhan publik yang efektif dan efisien.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan corak berfikir seseorang atau sekelompok orang yang tentu akan berbeda, karena ilmu pengetahuan yang bersifat nisbi. Hanya ilmu – ilmu eksakta yang cenderung objek, fakta dan hukumnya relatif lebih lama untuk tidak terpengaruh oleh situasi kondisi dibanding ilmu-ilmu sosial.

Thomas S. Kuhn (Pasolong, 2010: 27), mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai – nilai, metode – metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.

Prajudi Atmosudirdjo (Pasolong, 2010 : 28), mengatakan bahwa paradigma sebagai sudut pandang utama. Robert T. Golembiewski (Pasolong, 2010: 28), mengartikan bahwa paradigma adalah standar suatu disiplin ilmu dilihat dari fokus dan lokusnya.

Menurut Nicholas Henry dalam bukunya (Thoha 2008 : 18-23)

1. Paradigma 1 : Dikotomi politik-administrasi (1900-1926)

Waktu yang menandai periode paradigma pertama adalah dipublikasikannya buku yang ditulis oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Dalam buku yang berjudul *Politics and Administration* (1900), Goodnow berpendapat bahwa ada dua fungsi yang berbeda dari pemerintah. “Politik “menurut Goodnow, harus berhubungan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negara, sedangkan administrasi harus berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Dengan demikian yang menjadi dasar pembeda adalah pemisahan kekuasaan.

Penekanan paradigma kesatu adalah pada lokus (tempat) di mana administrasi negara berada, Goodnow dan para pengikutnya berpendapat administrasi negara seharusnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintahan.

2. Paradigma 2 : Prinsip-prinsip administrasi negara (1927-1937)

Dalam administrasi negara memang ada prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip itu akan ditemukan dan para pegawai administrasi akan dapat memperoleh keahlian dalam bidangnya, jika mereka belajar cara menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Fokus pada bidang ini yaitu keahlian dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi bertambah luas. Lokus administrasi negara berlaku di mana pun, karena prinsip adalah tetap prinsip dan tetap administrasi. Prinsip-prinsip administrasi ada dan tetap berlaku, dengan batasan prinsip-prinsip “bekerja” dalam suasana administrasi manapun, tanpa memandang budaya, fungsi, lingkungan, misi atau kerangka institusional serta tanpa pengecualian prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan di mana pun juga dengan berhasil.

Bagi Gulick dan Urwick, prinsip-prinsip administrasi adalah penting sedangkan keterkaitan prinsip tersebut diterapkan tidaklah penting. Dengan kata lain “fokus lebih penting daripada lokus.”

3. Paradigma 3 : Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Sebagai akibat dari perhatian dan kritik-kritik konseptual yang mengalir, administrasi negara melompat ke belakang dengan serta merta ke dalam induk disiplin ilmu politik. Hasilnya adalah diperbaharainya kembali penentuan lokus yaitu birokrasi pemerintah tetapi dengan demikian kehilangan fokusnya. Singkat kata, tahap penentuan ketiga ini sebagian besar merupakan usaha menetapkan kembali kaitan-kaitan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik.

Perbandingan administrasi negara, sebagaimana diterangkan Ferral Heady, memusatkan pada lima “permasalahan motivasi” sebagai kegiatan ilmiah ;pencarian teori ; dorongan bagi aplikasi praktis ; sumbangan bagi perluasan perbandingan politik ; perlunya peneliti yang terlatih dalam tradisi hukum administrasi; dan analisa perbandingan berbagai masalah administrasi yang ada. Administrasi negara mempunyai dua perbedaan dengan masing-masing mempunyai kajian perbandingan sub-bidangnya.

4. Paradigma 4 : Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Istilah ilmu administrasi disini digunakan sebagai penangkap semua frasa bagi kajian di dalam teori organisasi dan ilmu manajemen. Sebagai paradigma, ilmu administrasi menyajikan suatu fokus, bukan lokus. Menawarkan teknik, seringkali tekniknya sangat canggih yang menurut keahlian dan spesialisasi tapi untuk bidang apa keahlian tersebut harus diterapkan tidak dijelaskan. Sebagaimana pada paradigma 2, administrasi adalah administrasi di manapun ia ditemui fokus lebih diperhatikan daripada lokus.

Di awal tahun 1990-an, “Pengembangan Organisasi” makin banyak mendapat perhatian sebagai bidang khusus ilmu administrasi. Pengembangan organisasi sebagai ilmu, berakar pada psikologi sosial dan nilai : “demokrasi” birokrasi, baik negara maupun swasta dan aktualisasi para anggota perorangan dari organisasi.

5. Paradigma 5 : Administrasi negara sebagai administrasi negara (1970 sampai sekarang)

Belum ada fokus bidang studi yang bisa disebut “ilmu administrasi yang murni”, yang ada adalah teori organisasi yang selama 2,5 dasawarsa terakhir memuakkan perhatiannya perilaku orang-orang di dalamnya dan mengapa demikian, serta bagaimana dan mengapa keputusan dibuat. Sedikit saja kemajuan dalam menggambarkan lokus dari bidang studi tersebut atau dalam menentukan apa relevansi kepentingan umum, urusan umum dan “penentuan kebijakan umum” bagi para ahli administrasi negara. Meskipun begitu, bidang ini merupakan faktor-faktor sosial fundamental tertentu yang khas bagi negara-negara terbelakang sebagai lokusnya.

Berdasarkan paradigma yang dijelaskan diatas dapat dirangkum jika administrasi publik hadir tidak statis namun dinamis mengikuti kondisi terkini dengan bukti dari tahun ke tahun ada perubahan orientasi administrasi publik. Komponen penting yang terdapat pada administrasi publik yaitu adanya pembahasan terkait Pemerintah dan Publik (masyarakat umum). Sehingga administrasi publik dalam menjalankan perannya mempunyai lokus dan focus tidak hanya pada pemerintahan, namun pada kepentingan rakyat pada umumnya. Administrasi publik dalam keberlangsungannya perlu peran manajemen yang baik, dan manajemen publik adalah salah satu aspek yang akan dapat membantu tercapainya administrasi publik yang baik.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substantif, makna manajemen mengandung

unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Kata manajemen juga diambil dari bahasa Prancis kuno *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Mary Parker Follet (Anton A, 2013: 13), mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Malayu S.P. Hasibuan (Anton A, 2013: 13), menjelaskan bahwa manajemen dalam bahasa Inggris artinya *to manage*, yaitu mengatur. Oleh karena itu, menurutnya, pertanyaan yang muncul adalah tentang apa yang diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, bagaimana mengaturnya, dan di mana harus diatur.

Manajemen publik pada dasarnya merupakan manajemen instansi pemerintah. Overman (Keban, 200: 2004), manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning, organizing, controlling* di satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik.

Menurut definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di dalam sebuah organisasi sekaligus sebagai menunjang organisasi dalam pencapaian tujuannya. Selain itu manajemen publik juga merupakan bagian dari administrasi publik yang dalam prakteknya dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Manajemen merupakan aspek yang sangat penting karena tiap organisasi memerlukan manajemen untuk keberlangsungan organisasinya. Begitu juga dengan organisasi pemerintahanpun

dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memerlukan manajemen dan perlu menjalankan fungsi-fungsi dari manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

1.5.5 Fungsi – Fungsi Manajemen

Manajemen dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu, tetapi pendapat dari para ahli manajemen mengenai fungsi-fungsi tersebut belum ada persamaan secara menyeluruh. Fungsi manajemen dalam hal ini adalah sejumlah kegiatan yang meliputi beraneka ragam jenis pekerjaan yang dapat digolongkan ke dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administratif.

Di dalam ilmu manajemen terdapat banyak sekali jenis pekerjaan yang menjadi patokan tiap masing – masing tokoh dalam fungsi manajemennya. Jenis pekerjaan yang dapat digolongkan di antaranya *Leading* (memimpin), *Planning* (merencanakan), *Organizing* (menyusun), *Motivating* (motivasi), *Budgeting* (penganggaran), *System* (penyusunan sistem), *Staffing* (penyusunan pegawai), *Directing* (pengarahan), *Controlling* (mengawasi dan meneliti) dan lain – lain. Secara umum, dunia manajemen menggunakan prinsip *POAC* atau *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*. Dewasa ini prinsip manajemen *POAC* ini banyak digunakan oleh organisasi kecil maupun organisasi besar yang bertujuan untuk mengelola dan lebih mengembangkan serta memajukan organisasi. *POAC* lebih banyak digunakan dan diterapkan karena *POAC* lebih sesuai untuk setiap tingkat manajemen.

1.5.5.1 *Planning* atau Perencanaan

Harold Koontz dan O'Donnell dalam buku *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) mengemukakan ”*planning* ialah fungsi daripada Manager di dalam pemilihan alternatif-alternatif, tujuan-tujuan, kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program”. Selanjutnya Harold Koontz dan O'Donnell dalam buku *Principles of Management* mengemukakan prinsip-prinsip *planning* sebagai berikut :

1. Prinsip membantu tercapainya tujuan (*principle of contribution on to objective*).

Setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditujukan kepada pencapaian tujuan.

2. Prinsip efisiensi daripada perencanaan (*principle of efficiency of plans*)

Suatu perencanaan adalah efisien bilamana perencanaan itu dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya.

3. Prinsip pengutamaan perencanaan (*principle of primacy of planning*)

Perencanaan merupakan keperluan utama daripada manager, fungsi lainnya ialah *organizing, staffing, directing* dan *control*.

4. Prinsip pemerataan perencanaan (*principle of pervasiveness of planning*)

Prinsip pemerataan perencanaan memegang peranan penting, mengingat manager dalam tingkat tinggi banyak mengerjakan perencanaan dan bertanggung jawab atas berhasilnya rencana itu.

5. Prinsip patokan perencanaan (*principle of planning premise*)

Patokan-patokan perencanaan sangat berguna bagi ramalan, karena *premise-premise planning* dapat menunjukkan kejadian-kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang

6. Prinsip kebijaksanaan pola kerja (*principle of policy frame-work*)

Kebijaksanaan ini mewujudkan pola kerja. Dalam pola kerja itulah prosedur-prosedur kerja dan program tersusun

7. Prinsip waktu (*principle of timing*)

Perencanaan yang efektif dan efisien memerlukan waktu yang cukup dalam penyusunan baik horizontal maupun vertical

8. Prinsip tata hubungan perencanaan (*principle of planning communication*)

Perencanaan dapat disusun dan dikoordinasikan dengan baik, bilamana setiap orang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memperoleh penjelasan yang cukup memadai mengenai bidang yang akan dilaksanakan

9. Prinsip alternatif (*principle of alternatives*)

Alternatif itu ada pada setiap rangkaian kerja dan perencanaan meliputi pemilihan rangkaian alternatif dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

10. Prinsip pembatasan factor (*principle of limiting factor*)

Dalam pemilihan di antara alternatif-alternatif, maka pertama-tama harus ditujukan kepada faktor-faktor yang strategis dan dapat membantu pemecahan masalah

11. Prinsip keterikatan (*the commitment principle*)

Perencanaan harus memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan

12. Prinsip fleksibilitas (*the principle of flexibility*)

Perencanaan yang efektif memerlukan fleksibilitas tetapi tidak berarti merubah tujuan

13. Prinsip ketetapan arah (*principle of navigational change*)

Perencanaan yang efektif memerlukan pengamatan yang terus-menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaannya untuk mempertahankan tujuan

14. Prinsip perencanaan strategis (*principle of strategic planning*)

Dalam suatu kondisi di mana terdapat persaingan, yaitu di mana pihak lain berusaha untuk mencapai tujuan yang sama, maka manager harus memilih tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perencanaan tetap efektif.

George R. Terry (Sukarna, 2011: 10) mendefinisikan planning adalah :

“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed of proposed activities believed necessary to achieve desired result”.

“....Perencanaan ialah pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.”

George R. Terry dan Leslie W dalam bukunya Dasar – Dasar Manajemen menjabarkan fungsi manajemen *Planning* atau Perencanaan (Ticoalu, 2013: 9) yang terdiri atas :

- “*Self audit*” menentukan keadaan sekarang
- “*survey*” lingkungan
- Menentukan tujuan “*objectivitas*”
- “*forecast*” ramalan/perkiraan keadaan yang akan datang
- Melakukan tindakan – tindakan dan sumber pengarahan
- “*evaluate*” pertimbangan tindakan – tindakan diusulkan
- Ubah dan sesuaikan “*revisi and adjust*” rencana – rencana sehubungan dengan hasil – hasil pengawasan dan keadaan – keadaan yang berubah – ubah
- “*communicate*” berhubungan terus selama proses perencanaan

Adapun keuntungan-keuntungan daripada perencanaan menurut G.R. Terry dalam buku *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 34), ialah sebagai berikut :

1. Pertama-tama perencanaan menyebabkan bahwa kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan bertujuan
2. Perencanaan meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak produktif
3. Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil kerja

4. Perencanaan menyebabkan fasilitas-fasilitas yang ada dalam perusahaan dipergunakan dengan sebaik-baiknya
5. Perencanaan memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap
6. Perencanaan juga memberikan suatu landasan untuk pengawasan

Menurut Billy E. Goatz (Sukarna, 2011: 10) *planning* ialah pemilihan yang fundamental dan persoalan *planning* timbul ketika terdapat alternatif-alternatif

Ridhotullah dan Jauhar (2015:1) mendefinisikan perencanaan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Kegiatan dalam Fungsi perencanaan yaitu:

1. Menetapkan tujuan dan target bisnis
2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut
3. Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan
4. Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis.

Hariani (2013 : 17) mengatakan bahwa para manajer pertama-tama harus memutuskan apa yang harus dikerjakan, ia harus menetapkan tujuan jangka

pendek dan jangka panjang untuk organisasi, serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Hariani, fungsi perencanaan mencakup:

1. Penetapan tujuan dan standar
2. Penetapan aturan dan prosedur
3. Pembuatan rencana
4. Peramalan apa yang terjadi

Menurut Ghozali (Ridhatullah dan Jauhar, 2015 : 128) penyusunan perencanaan itu terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Merumuskan misi dan tujuan
2. Memahami keadaan saat ini
3. Mempertimbangkan faktor penghambat dan pendukung tercapainya tujuan
4. Menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa penjelasan mengenai fungsi *Planning* atau Perencanaan ini dapat dirangkum jika *Planning* atau Perencanaan merupakan kegiatan dasar yang harus dikerjakan dengan baik karena menjadi tolak awal sebelum dilakukannya sebuah program, yang mana dalam perencanaan harus tepat dalam melihat tujuan sasaran atau visi dan misinya, kemudian memiliki rumusan atau kebijakan yang dalam pembuatannya mencakup ramalan keadaan yang akan datang, lalu mempunyai target atau skala prioritas yang jelas dan realistis.

1.5.5.2 Organizing atau Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan cara dalam pembuatan struktur organisasi yang cocok dengan sasaran organisasi, sumber daya-sumber daya yang dipunyai, dan lingkungan sekelilingnya. Pengorganisasian dalam fungsi manajemen berusaha untuk mensinkronkan sumber daya yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk mencapai sasaran organisasi. Sumber daya yang termasuk di antaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal. Jika melihat sumber daya manusia, maka akan terkait dengan MSDM (manajemen sumber daya manusia). Dalam MSDM ada proses pengadaan karyawan/pegawai, Malayu Hasibuan dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia” menuliskan jika dalam pengadaan karyawan/pegawai harus didasarkan pada prinsip *apa baru siapa*. *Apa* artinya yaitu pekerjaan-pekerjaannya harus ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan uraian pekerjaan (*job description*). Kemudian *siapa*, dengan mencari orang yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut berdasarkan spesifikasi pekerjaan (*job specification*). Proses ini dilakukan untuk membagi suatu pekerjaan kompleks menjadi pekerjaan yang sederhana dan mampu dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Misalnya pengorganisasian dilaksanakan dalam penentuan kewajiban yang perlu diselesaikan, siapa pelaksana dan penanggung jawab, dan bagaimana tugas tersebut dikelompokkan. Hal ini akan mempermudah manajer dalam melakukan pekerjaan dan pengawasan akan pekerjaan tersebut.

Menurut Paul Bertholeneus dalam buku *An Outline of Public Administration* (Sukarna, 2011: 37) menyebutkan :

“Organization is an arrangement, presumably logical, of interdependent parts to form a unified whole, through which power and control can be exercised to the end of achieving a given purpose”

“organisasi ialah susunan yang agak logis dari bagian-bagian yang saling berhubungan untuk mewujudkan suatu keseluruhan yang bulat padu, sehingga kekuasaan dan pengawasan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan telah ditetapkan”

Menurut Louis Allen dalam buku *Management and Organization* (Sukarna, 2011: 38) mengatakan :

“We can define organization as the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives”

“Kita dapat merumuskan organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dilakukan., menetapkan dan melimpahkan tanggung jawab dan wewenang, serta mewujudkan hubungan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan”

Menurut Harold Koontz dan O'Donnell dalam buku *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 38) mengemukakan tentang organizing sebagai berikut :

“The organization function of manager involves the determinations and enumeration of the activities required to achieve the objectives of the enterprise, the grouping of the activities, the assignment of such group of activities to a department headed by a manager and the delegation of authority to carry them out”

“...pengorganisasian daripada manager meliputi penentuan, penghitungan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, pengelompokan kegiatan-kegiatan, penempatan kelompok kegiatan-kegiatan termaksud kedalam suatu bagian yang dikepalai oleh seseorang manager, serta pelimpahan wewenang untuk melaksanakannya”

Untuk terwujudnya suatu organisasi yang baik, menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donnell dalam buku *Principles of Management* harus ada prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut :

1. Prinsip kesatuan tujuan

Di dalam organisasi harus ada kesatuan tujuan dan merata dari atas sampai bawah

2. Prinsip hasil guna

Suatu organisasi dalam mencapai tujuannya harus dapat mempergunakan biaya sekecil-kecilnya dengan pengorbanan yang sedikit-dikitnya

3. Prinsip rentangan manajemen

Seorang itu terbatas di dalam mengurus orang-orang lain atau memimpin bawahnya. Batas-batas tersebut tidak tepat bagi setiap orang tergantung

kepada kekompleksan hubungan antara atasan dan bawahan dan kepada kemampuan manager

4. Prinsip hirarchie (kekuasaan yang jelas)

Di dalam setiap organisasi harus ada kekuasaan yang jelas agar tidak terjadi kesimpangsiuran

5. Prinsip pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai dengan garis wewenang dan pelimpahan wewenang

6. Prinsip keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab

Tanggungjawab dan wewenang itu harus seimbang. Wewenang yang dilimpahkan dengan tanggungjawab yang timbul karenanya harus selaras, jangan hendaknya pelimpahan wewenang meminta pertanggungjawaban yang lebih besar daripada authority itu sendiri. Atau sebaliknya pertanggungjawaban lebih kecil daripada authority yang didelegasikan.

Hubungan antarmanusia ini diperlukan dalam penciptaan keselarasan koordinasi pimpinan dan bawahan. Malayu Hasibuan dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia” menjelaskan “Hubungan antarmanusia (human relation) adalah hubungan kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu demi terpadunya kepentingan bersama”.

7. Prinsip kesatuan perintah

Setiap bawahan seharusnya mempunyai satu atasan. Karena setiap bawahan mendapat perintah dari berbagai-bagai atasan, akan sulit menyalurkan pertanggungjawaban

8. Prinsip tingkatan wewenang

Penentuan tujuan hanya berada pada tingkat authority yang tertinggi

9. Prinsip pembagian kerja

Susunan organisasi harus dibagi dalam kelompok kegiatan, sehingga tujuan dapat dicapai dengan efektif

10. Prinsip penetapan kerja

Setiap posisi atau jabatan harus ditentukan kerja/tugasnya sesuai dengan pelimpahan wewenang

11. Prinsip daya suai

Manager di dalam usahanya mencapai tujuan dalam keadaan yang berubah-ubah harus bertindak sedemikian rupa yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung, sehingga organisasi itu selalu sesuai dengan kondisi

12. Prinsip keseimbangan

Penerapan prinsip-prinsip atau teknik-teknik harus sesuai dengan daya mampu (efektivitas) organisasi, agar supaya tujuan tercapai

13. Prinsip kelangsungan

Organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk menjamin kelangsungan

14. Prinsip kenudahan kepemimpinan

Struktur organisasi, pelimpahan wewenang, harus diusahakan untuk mempermudah kepemimpinan manager. Managership sebagian tergantung kepada kualitas leadership, oleh karena itu di dalam struktur organisasi penting diciptakan suatu situasi untuk mempermudah manager menjalankan kepemimpinannya. Dalam pengertian ini organisasi merupakan teknik kepemimpinan. Apabila dalam organisasi itu wewenang untuk planning, directing, staffing dan controlling didelegasikan kepada suatu staf atau bawahan, sehingga organisasi itu menjadi kacau maka manager akan sukar untuk menjalankan kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya.

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 38) mengemukakan tentang organizing sebagai berikut, yaitu

“Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to these activities, the providing of suitable physical factors of enviroment and the indicating of the relative authority delegated to each respectives activity”

“...Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan”

G.R. Terry dalam buku *Principles of Management* mengemukakan tentang asas-asas organizing, sebagai berikut :

1. *The objective* (tujuan)

Penentuan tujuan merupakan syarat mutlak untuk segala kegiatan, dengan adanya tujuan maka kegiatan-kegiatan akan menjadi terarah dan produktif.

2. *Departmentation* (pembagian kerja)

Departmentation mengandung arti seperti division of work atau pembagian kerja, yaitu pengelompokkan tugas-tugas atas kegiatan yang sama atau bertalian dengan itu ke dalam suatu unit kerja atau unit organisasi. Dalam departementasi itu ada beberapa macam yaitu :

a. *Departementation by function*

Pengelompokkan kegiatan yang sama atau bersamaan kedalam suatu unit organisasi kerja, seperti bagian produksi, bagian keuangan, bagian penjualan, bagian personil

b. *Departementation by product*

Pengelompokkan kegiatan yang sama atau bertalian dengan itu menurut jenis barang yang dihasilkan

c. *Departementation by territory*

Pengelompokkan kegiatan kerja yang sama atau bertalian dengan itu menurut wilayah atau daerah

d. *Departementation by customer*

Pengelomppokan kegiatan/tugas-tugas yang sama atau bertalian dengan itu menurut para langganan

e. *Departementation by process*

Perincian dan pengelompokkan kegiatan/tugas-tugas yang sama atau erat hubungannya satu sama lain atau bertalian dengan itu menurut proses kerja yang harus dilalui secara berurutan

f. *Departementation by time*

Pengelompokkan kegiatan/tugas yang sama atau bertalian dengan itu menurut waktu, seperti siang hari dan malam hari

3. *Assign the personnel* (penempatan tenaga kerja)

Setelah diadakan pembagian kerja, maka selanjutnya adalah penempatan orang-orang. Penempatan orang-orang tidak lepas dari bagaimana mencarinya. Oleh karena ini berbicara tentang mencari dan menempatkan tenaga kerja adalah berbicara tentang staffing

4. *Authority and responsibility* (wewenang dan tanggung jawab)

Setelah penetapan orang-orang, maka selanjutnya perlu penetapan wewenang dan tanggung jawab agar orang-orang terkait dapat bekerja dengan baik. Adapun menurut G.R. Terry, *authority is the power or the right to act, to command, or to exact action by others*, yang artinya wewenang adalah kekuasaan atau hak untuk bertindak, untuk memerintah atau untuk menimbulkan tindakan-tindakan oleh orang lain.

5. *Delegation of authority* (pelimpahan wewenang)

Pelimpahan wewenang tidak sekedar memberikan atau menyerahkan wewenang tapi harus disertai tanggung jawab, maksudnya dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak dipenuhi dengan baik maka wewenang

tersebut dapat ditarik kembali. Untuk berhasilnya suatu *Delegation of authority*. G.R. Terry menyebutkan langkah-langkah untuk berhasilnya pelimpahan (*steps to successful delegation*), sebagai berikut :

- a. *Estabilish a work climate free from fear and frustration* (wujudkanlah suasana kerja yang bebas dari ketakutan dan ketidakpuasan)
- b. *Tie in with intelligent planning* (ikatlah dengan perencanaan yang baik)
- c. *Determine decisions and tasks to be delegated* (tentukanlah keputusan-keputusan dan tugas-tugas yang akan dilimpahkan)
- d. *Choose the delegated wisely* (pilihlah orang-orang yang akan dilimpahi wewenang dengan bijaksana/seksama)
- e. *Delegate authority for whole job* (limpahkanlah wewenang untuk pekerjaan sepenuhnya)
- f. *Give assistance to delegate* (berikanlah bantuan terhadap orang yang dilimpahi)
- g. *Evaluated the results obtained* (nilailah hasil-hasil yang dicapai)

Penjabaran mengenai Organizing atau Pengorganisasian oleh George R. Terry dan Leslie W dalam bukunya Dasar – Dasar Manajemen (alih bahasa G. A. Ticoalu, 2013: 9) :

- “*identity*” tetapkan dengan teliti dan menentukan pekerjaan yang akan dilakanakan
- “*break your down*” bagi – bagi tugas pekerjaan menjadi tugas setiap orang
- Tugas – tugas kelompok menjadi posisi

- Kelompok – kelompok posisi menjadi satuan – satuan yang dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan baik
- Bagi – bagi pekerjaan, penanggungjawaban dan luas kekuasaan yang akan dilaksanakan
- Ubah dan sesuaikan organisasi sesuai dengai hasil – hasil pengawasan dan kondisi – kondisi yang berubah – berubah
- Berhubungan selalu selama proses pengorganisasian

Banyak pendapat mengenai definisi fungsi pengorganisasian termasuk kegiatan apa saja yang ada di dalamnya. Ridhatullah dan Jauhar dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen (2015 : 125) mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian, yaitu:

1. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan
2. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggungjawab

3. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia/tenaga kerja
4. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat

Hariani (2013 : 17) menjelaskan bahwa di dalam pengorganisasian manajer memutuskan posisi-posisi yang perlu diisi dan tanggungjawab yang melekat pada setiap posisi tersebut. Hariani menyebutkan ada lima kegiatan yang ada pada fungsi pengorganisasian, yaitu:

1. Pemberian tugas yang terpisah pada masing-masing bawahan
2. Membentuk bagian-bagian
3. Mendelegasikan wewenang kepada bawahan
4. Menetapkan jalur wewenang dan komunikasi
5. Mengkoordinir kerja bawahan

Dari beberapa penjelasan mengenai fungsi *Organizing* atau Pengorganisasian ini dapat dirangkum jika Pengorganisasian adalah proses untuk mewujudkan terjalannya kerjasama secara efektif oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Kegiatan yang dilakukan bisa berupa pembagian pekerjaan dalam tugas operasional, kemudian penempatan aperatur pada pekerjaan atau posisi yang tepat sehingga dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan baik, lalu pembuatan struktur agar memperjelas alur kerja dan pertanggung jawabannya. Kemudian dalam pengorganisasian harus

memperhatikan aspek penting yang di antaranya yaitu tujuan yang hendak dicapai, penetapan dan pengelompokkan tujuan, wewenang dan tanggung jawab, hubungan satu sama lain dan yang terakhir yaitu penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan/tugas-tugas.

1.5.5.3 *Actuating* atau Penggerakan

Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan. Jadi *actuating* artinya menggerakkan orang-orang untuk bekerja dengan secara individu maupun kelompok bersama-sama untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain *actuating* adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman pada perencanaan (*planing*) dan usaha pengorganisasian.

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 82) mengatakan bahwa

“Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strive to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts”.

“....Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.

Penjabaran mengenai *Actuating* atau Penggerakan oleh George R. Terry dan Leslie W dalam bukunya Dasar – Dasar Manajemen (alih bahasa G. A. Ticoalu, 2013: 9) :

- Berhubungan dengan staf dan jelaskan tujuan – tujuan kepada bawahan
- Bagikan ukuran – ukuran pelaksanaan “*performance standarts*”
- Latih dan bimbing bawahan untuk memenuhi ukuran-ukuran pelaksanaan itu
- Beri bawahan upah berdasarkan pelaksanaan
- Puji dan tegur dengan jujur
- Adakan lingkungan yang memberikan dorongan dengan meneruskan keadaan yang berubah-ubah serta tuntutan-tuntutan
- Ubah dan sesuaikan cara-cara memotivasi sehubungan dengan hasil pengawasan dan kondisi yang berubah
- Berhubungan selalu selama proses pemotivasian

Actuating/penggerakan dalam keberhasilannya tergantung kepada factor-faktor berikut :

1. Kepemimpinan

G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 83) mengatakan bahwa “*Leadership is the activity of influencing people to strive willingly for mutual objectives*” yang artinya kepemimpinan

ialah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar supaya berusaha dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama.

Syarat-syarat kepemimpinan menurut G.R. Terry yaitu :

- a. Sehat jasmaniah-rokhaniah (*energy*)
- b. Keseimbangan/kemantapan perasaan (*emotional stability*)
- c. Pengetahuan tentang hubungan kemanusiaan (*knowledge of human relations*)
- d. Dorongan pribadi (*personal motivation*)
- e. Kecakapan berkomunikasi/berhubungan (*communicative skill*)
- f. Kecakapan mengajar (*teaching ability*)
- g. Kecakapan bergaul (*social skill*)
- h. Kemampuan teknis (*technical competence*)

Syarat-syarat kepemimpinan menurut Ordway Tead dalam buku *The Art of Leadership* (Sukarna, 2011: 84) di antaranya :

- a. Kuat jasmaniah dan rokhaniah
- b. Bersemangat untuk mencapai tujuan
- c. Bergairah dalam pekerjaan
- d. Ramah-tamah
- e. Jujur, dapat dipercaya
- f. Memiliki kemahiran teknis
- g. Sanggup mengambil keputusan
- h. Cerdas

- i. Memiliki keahlian mengajar
 - j. Setia terhadap organisasi
2. Sikap dan moril (*attitude and morale*)

Menurut G.R Terry, *attitude has been described as "...a learned readiness to react in a certain maner which normally involves in part a symbolic act..."* atau suatu kesiapan (yang telah terbiasa) untuk bereaksi dalam suatu cara tertentu yang biasanya sebagian meliputi suatu cara tertentu yang sebagian meliputi suatu tindakan simbolis. Melihat uraian diatas, sikap tiada lain daripada reaksi yang ditunjukkan terhadap sesuatu, sesuai dengan pola pikir, berperasaan dan bertindak dalam hidupnya. Sehingga sikap manager akan berbeda sesuai pola hidupnya.

Sikap positif para pegawai bisa ditimbulkan. G.R. Terry mengemukakan lima saran untuk mengembangkan sikap-sikap yang menguntungkan, di antaranya :

- a. Milikilah pandangan yang praktis dan menyeluruh terhadap hidup dan para pekerja
- b. Ambillah bagian yang konstruktif dari setiap persoalan
- c. Berilah orang-orang lain perasaan penting dan perasaan mempunyai harga diri
- d. Resapkanlah tentang nilai-nilai tertentu dalam hidup

Moral bagi manager dan pegawai sangat penting mengingat apabila manager moralenya rendah, maka akan mudah berputus asa dalam

menghadapi kesukaran dan para pegawai juga akan tidak disiplin dalam pekerjaannya.

G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 91) mengatakan bahwa “*Morale is the attitude of employees toward management members, toward their jobs, and toward each other*”, atau morale ialah sikap para pekerja terhadap anggota-anggota manajemen, terhadap pekerjaannya dan terhadap satu sama lain.

3. Tata hubungan (*communication*)

Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan berhasil atau tidaknya tergantung oleh komunikasi atau tata hubungan. Proses manajemen akan tidak jalan apabila tidak adanya komunikasi karena ini merupakan faktor penting dalam manajemen.

Dalam melakukan komunikasi ada beberapa macamnya, di antaranya :

a. Komunikasi intern

Komunikasi yang dilakukan dalam organisasi itu sendiri, baik antara atasan dengan atasan, antara bawahan dengan atasan maupun sebaliknya

b. Komunikasi ekstern

Komunikasi yang dilakukan keluar organisasi

c. Komunikasi horizontal

Komunikasi baik intern maupun ekstern antara jabatan yang sama

d. Komunikasi vertical

Komunikasi yang dilakukan dalam intern antara atasan dan bawahan atau sebaliknya dalam situasi formil

e. Komunikasi formal

Komunikasi yang dilakukan ekstern maupun intern secara formil

f. Komunikasi informal

Komunikasi yang dilakukan ekstern maupun intern secara pribadi.

Komunikasi ini dapat melancarkan komunikasi formil

g. Komunikasi lisan

Komunikasi yang dilakukan secara lisan baik itu dalam komunikasi formal informal, vertical horizontal

h. Komunikasi tulisan

Komunikasi yang dilakukan secara tertulis baik itu dalam komunikasi vertical maupun horizontal.

Komunikasi dalam organisasi memiliki tujuan-tujuan. Keith Davis dalam bukunya *Human Relations in Business* (Sukarna, 2011: 95) mengatakan tujuan komunikasi di antaranya :

- a. Untuk menyediakan keterangan dan pengertian yang diperlukan untuk usaha bersama
- b. Untuk membangkitkan sikap-sikap yang diperlukan agar supaya terdapat dorongan kerja, kerja sama dan kepuasan kerja

4. Perangsang (*incentive*)

Dalam buku *The Advanced Learners Dictionary of Current English* karya A.S Hornby et.al memberi penjelasan bahwa : "*Incentive that*

which incites or rouses a person to action”, yang artinya “insentif adalah sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan seorang bertindak”.

Lee H. Hill menyebutkan jenis-jenis insentif sebagai berikut :

- Keamanan
- Memperhatikan sebaik-baiknya terhadap keluhan-keluhan pegawai
- Kondisi kerja
- Kenaikan tingkat
- Keselamatan
- Upah
- Pengakuan/penghargaan
- Supervise
- Jaminan
- Instruksi pekerjaan
- Ikut serta dalam manajemen
- Penjelasan
- Jumlah jam kerja
- Perencanaan kerja
- Ekspresi sendiri
- Metode yang efisien

G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* menyebutkan jenis-jenis insentif di antaranya :

- a. insentif positif

sesuatu penghargaan yang diinginkan sebagai balas jasa untuk usaha atau hasil baik atau istimewa yang telah dicapai

b. insentif negative

insentif negative didasari oleh perasaan takut, hal ini menyebabkan para pekerja giat bekerja untuk menghindari konsekuensi yang tidak diharapkan

5. Supervise (*supervision*)

G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 102) mengatakan bahwa "*Supervision is the activity of managing at the organization level where management member and nonmanagement members of an enterprise are indirect contact*", yang artinya "Supervisi adalah kegiatan pengurusan dalam tindakan organisasi di mana anggota manajemen dan bukan anggota manajemen saling berhubungan secara langsung".

Peran supervisi sangat penting untuk menggerakkan pegawai dalam bekerja, olehnya tugas supervisi cukup berat karena supervise harus dapat menemukan kesalahan-kesalahan dan memperbaikinya, serta memberi petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan memberi nasihat-nasihat terhadap pegawai yang mengalami kesulitan.

6. Disiplin (*discipline*)

Dalam Kamus Administrasi, disiplin diberi penjelasan sebagai "Suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa

senang hati. Oleh karena itu disiplin merupakan alat untuk menggerakkan pegawai, sehingga mereka bekerja dengan efektif dan terarah kepada sasaran yang dituju.

Hasibuan (2006 : 183) menyatakan bahwa pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasibuan kemudian menyebutkan ada empat pokok masalah yang dipelajari pada fungsi pengarahan, yaitu:

1. Tingkah laku manusia (human behaviour)
2. Hubungan manusiawi (human relation)
3. Komunikasi (communication)
4. Kepemimpinan (leadership)

Dari beberapa penjelasan mengenai fungsi *Actuating* atau Penggerakan ini dapat dirangkum jika penggerakan merupakan proses mendorong kinerja dari orang-orang yang ada diorganisasi. Kegiatan Penggerakan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dari semua pihak yang berhubungan dengan staf dan atasan, kemudian juga dalam *actuating* atau penggerakan ini perlu diberikannya perangsang berupa motivasi, pujian maupun teguran, atau insentif, lalu yang terakhir mengembangkan potensi pegawai secara optimal, misal dengan memberikan pelatihan dan bimbing pegawai.

1.5.5.4 Controlling atau Pengawasan

Controlling menurut Websters New Collegiate Dictionary (Sukarna, 2011: 109) :

1. *To check or regulate as payment, to keep within limits, as speed* - yang artinya mengecek atau mengatur seperti pembayaran, menyesuaikan dengan batas-batas seperti kecepatan
2. *To test as veriry by counter or pararel evidence or experiment* – yang artinya menguji atau memeriksa dengan bukti atau pengalaman yang sama atau sebaliknya

Henry Fayol dalam buku *General and Industrial Management* (Sukarna, 2011: 111) mengatakan Pengawasan ialah pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Jadi tujuannya ialah untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan agar supaya menjadi benar dan mencegah pengulangan kesalahan. Pengawasan bergerak dalam segala bidang : bawang-barang, orang-orang dan tindakan-tindakannya.

Harold Koontz dalam buku *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 111) mengatakan pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar supaya rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Harold Koontz dan O'Donnell dalam buku *Principles of Management* menetapkan prinsip-prinsip pengawasan agar supaya pengawasan itu berjalan efektif sebagai berikut :

1. Prinsip tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*)
Pengendalian harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindari penyimpangan/deviasi dari perencanaan.
2. Prinsip efisiensi pengawasan (*principle of efesience of control*)
Pengendalian efisiensi ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan ha-hal lain yang diluar dugaan.
3. Prinsip tanggung jawab pengawasan (*principle of control responbility*)
Pengendalian hanya dapat dilaksanakan apabila manager dapat bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan rencana.
4. Prinsip pengawasan terhadap masa depan yang akan datang (*principle of future control*)
Pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik sekarang maupun pada masa yang akan datang.
5. Prinsip pengawasan langsung (*principle of direct control*)
Tehnik control yang paling efektif adalah mengusahakan adanya bawahan yang berkualitas baik.
6. Prinsip refleksi perencanaan (*principle of reflection of plan*)
Control harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
7. Prinsip penyesuaian dengan organisasi (*principle of organizational*)

Control harus dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi. Manager dan bawahannya merupakan sasaran untuk melaksanakan rencana.

8. Prinsip kedirian pengawas (*principle of individually of control*)

Control dan teknik pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer.

9. Prinsip standar (*principle of standar*)

Control yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.

10. Prinsip pengawasan terhadap strategis (*principle of strategic point control*)

Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan perhatian yang ditentukan factor-faktor yng strategis dalam pelaksanaan.

11. Prinsip kekecualian (*the exception principle*)

Perkecualian ini dapat terjadi keadaan tertentu ketika situasi berubah.

12. Prinsip pengendalian fleksibel (*principle of flexibility of control*)

Control harus luwes untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.

13. Prinsip peninjauan kembali (*principle of review*)

Sistem *Control* harus ditinjau berkali-kali agar system yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.

14. Prinsip tindakan (*principle of action*)

Control dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan daripada *planning, organizing, staffing, dan directing*.

Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011: 110) mengemukakan bahwa *Controlling*, yaitu:

“Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard”.

“...Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standard apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard”.

Penjabaran mengenai *Controlling* atau Pengendalian oleh George R. Terry dan Leslie W dalam bukunya Dasar – Dasar Manajemen (alih bahasa G. A. Ticoalu, 2013: 9) :

- Tetapkan ukuran-ukuran
- Monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran
- Perbaiki penyimpangan-penyimpangan
- Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan perubahan-perubahan kondisi-kondisi
- Berhubungan selalu selama proses pengawasan

Proses pengawasan menurut G.R Terry sebagai berikut :

1. *Determining the standard or basis for control*

Tentukan standar atau dasar bagi pengawasan

2. *Measuring the performance*

Ukurlah pelaksanaan

3. *Comparing performance with the difference, if any*

Bandingkan pelaksanaan dengan standard an temukanlah perbedaan jika ada

4. *Correcting the deviation by means of remedial action*

Perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat

Hasibuan (2006 : 245) sendiri menyebutkan ada 4 (empat) proses dan cara-cara pengendalian, yaitu:

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Ridhotullah dan Jauhar (2015:3) mendefinisikan pengawasan sebagai proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai

dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Ridhotullah dan Jauhar menyebutkan ada 3 (tiga) langkah di dalam proses pengawasan dan pengendalian, yaitu:

1. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

Dari beberapa penjelasan mengenai fungsi *Controlling* atau Pengawasan ini dapat dirangkum jika Pengawasan dapat dibilang juga sebagai pengendalian yang mana mempunyai peranan penting untuk menguji apakah pelaksanaan kerja sudah sesuai tertib dengan landasan kerjanya. Dalam pengawasan ini perlu melihat berdasarkan ketetapan standar atau ukuran, kemudian perlu juga melihat secara akuntabilitas dan yang terakhir kinerja perlu dimonitor hasilnya serta dibandingkan dengan ukuran yang ditentukan.

1.5.6 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau pada hakikatnya merupakan salah satu unsur ruang kota yang mempunyai peran penting setara dengan unsur-unsur kota yang lain (Nirwono Joga, 2011: 91). Berbagai referensi menunjukkan Bahwa Ruang Terbuka Hijau merupakan lahan-lahan alami yang ada di wilayah perkotaan. Bentuk Ruang

Terbuka Hijau yang berupa fasilitas umum publik, sebagai tempat beraktivitas adalah taman kota, taman pemakaman, lapangan olahraga, hutan kota, dan lain-lain yang merupakan area lahan peruntukan lahan hijau secara definitif. Sedangkan pengertian RTH berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu lahan/ kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan sebagainya. Unsur alami inilah yang menjadi ciri Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya. Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang terbuka yang diklarifikasi sebagai ruang atau lahan yang mengandung unsur dan struktur alami. Pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau harus diarahkan sebagai infrastruktur hijau, sebagai penyeimbang ekosistem kota. Ruang Terbuka Hijau dimaknai tidak sekedar peruntukan lahan saja, tetapi merupakan sistem yang mempunyai landasan kuat (Nirwono Joga, 2011: 91-95).

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dirangkum jika Ruang Terbuka Hijau merupakan sebuah lahan atau kawasan terbuka yang mengelompok, menjalur dan ditumbuhi pepohonan atau tanaman secara sengaja ataupun alami. Pembangunan yang terjadi di mana-mana perlu diimbangi dengan dihadirkan Ruang Terbuka Hijau. Tiap daerah perlu menghadirkan Ruang Terbuka Hijau

dengan melakukan manajemen Ruang Terbuka Hijau yang baik karena Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi yang sangat baik bagi lingkungan dan manusia.

1.5.6.1 Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Fungsi Ruang Terbuka Hijau meliputi fungsi pelayanan fasilitas umum bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktif di dalamnya, seperti berinteraksi/ berekreasi, berolahraga, berwisata hutan dan lain-lain; fungsi pengamanan, peneduh, dan keindahan kota secara proporsional pada ruang-ruang kota; dan fungsi budidaya pertanian bagi kegiatan pertanian kota.

Ruang Terbuka Hijau sebagai infrastruktur hijau memiliki fungsi beragam (Nirwono Joga, 2011:98-101), yaitu:

a. Konservasi tanah dan air

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangat penting untuk meresapkan air hujan kedalam tanah, menyuplai cadangan air tanah, dan mengaktifkan siklus hidrologi.

b. Ameliorasi iklim

Keberadaan tanaman dan unsur air sebagai unsur utama Ruang Terbuka Hijau mampu menciptakan iklim mikro yang lebih baik.

c. Pengendali pencemaran

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau dapat mengendalikan bahan pencemar (polutan), sehingga tingkat pencemaran dapat ditekan dan konsentrasi karbondioksida dapat berkurang.

d. Habitat satwa dan konservasi plasma nutlah

Keberadaan satwa liar di wilayah perkotaan memberi warna tersendiri bagi kehidupan warga kota dan menjadi indikator tingkat kesehatan lingkungan kota.

e. Sarana kesehatan dan olahraga

Keberadaan ruang terbuka sangat berperan untuk meningkatkan kesehatan dan olahraga.

f. Sarana rekreasi dan wisata

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau mendukung kebutuhan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai tempat sarana rekreasi dan interaksi sosial warga.

g. Sarana pendidikan dan penyuluhan

Keberadaan dan tanaman dan unsur alam lainnya sebagai habitat satwa dan burung secara tidak langsung menjadi sarana pembelajaran bagi warga terutama anak-anak, selain meningkatkan kualitas lingkungan kota.

h. Area evakuasi bencana

Perlu pengembangan mitigasi bencana dengan menyiapkan area terbuka dikawasan perkotaan yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi. Ruang Terbuka Hijau seperti taman, halaman, lapangan bola dapat digunakan sebagai area evakuasi warga saat terjadi bencana.

i. Pengendali tata ruang kota

Ruang Terbuka Hijau sebagai kawasan reservasi dan konservasi yang terbentuk jalur hijau dapat dijadikan alat pengendali tata ruang kota dengan

fungsi sebagai sabuk hijau (*green belt*) atau jalur hijau pembatas kawasan maupun pembatas wilayah kota.

j. Estetika

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau dapat meningkatkan daya tarik dan keindahan suatu kota. Tanaman memiliki bentuk, warna, dan tekstur beraneka ragam sehingga dapat menambah keindahan pemandangan lanskap kota.

1.5.6.2 Manfaat

Berbeda dengan fungsi, ada pula manfaat yang diberikan. Manfaat ini dapat diperoleh dari fungsi-fungsi yang ada. Manfaat yang diperoleh terbagi menjadi dua yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. (<https://foresteract.com/ruang-terbuka-hijau/2/>). Diunduh pada 30 Maret 2020 pukul 12.50 WIB.

a. Manfaat Langsung

Manfaat langsung adalah manfaat yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, pengunjung, ataupun pihak lainnya. Salah satunya adalah manfaat yang diperoleh dari fungsi estetika seperti keindahan yang membuat masyarakat serta orang-orang yang berkunjung ke area ini merasa nyaman. Selain itu, juga didapatkan dari fungsi sosial budaya yang menyediakan tempat yang untuk melakukan kegiatan interaksi serta rekreasi. Dengan begitu akan membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah).

b. Manfaat Tidak Langsung

Jenis manfaat lainnya adalah manfaat tidak langsung. Area ini juga memberikan manfaat tidak langsung. Manfaat ini dapat dirasakan untuk jangka waktu yang panjang misal pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati). Manfaat ini diperoleh salah satunya dari fungsi ekologis sebagai peningkat kualitas lingkungan.

1.5.6.3 Jenis-Jenis dan Bentuk Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau memiliki beberapa klasifikasi, yaitu klasifikasi ruang terbuka hijau berdasarkan jenisnya dan bentuk RTH-nya. (<https://foresteract.com/ruang-terbuka-hijau/2/>). Diunduh pada 30 Maret 2020 pukul 13.00 WIB.

a. Klasifikasi berdasarkan Jenis Pemilikan Lahan

Berdasarkan jenisnya, RTH dibagi menjadi dua yaitu publik dan privat. Ruang terbuka hijau publik dimiliki oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat dan digunakan untuk kepentingan umum. Bentuk-bentuknya adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau. Jalur hijau ini terbentuk sepanjang jalan, sungai, hingga pantai. Berbeda dengan jenis publik, ruang terbuka hijau privat dimiliki perorangan berupa masyarakat ataupun pihak swasta. Bentuknya dapat berupa kebun atau halaman.

b. Klasifikasi berdasarkan Bentuknya

Berdasarkan bentuknya, RTH dibedakan menjadi beberapa bentuk.

- Taman Kota

Berdasarkan bentuknya, area ini terbagi menjadi beberapa bentuk yang salah satunya adalah taman kota. Dilihat dari namanya, area ini sudah pasti berada di wilayah perkotaan dan terdapat banyak aktivitas masyarakat mulai dari sebagai tempat diskusi hingga rekreasi. Tempat ini dibangun untuk meredam suara-suara bising serta polusi yang pada umumnya dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Taman kota dapat mempercantik kota dan memberikan kesan natural di tengah-tengah kepadatan daerah perkotaan. Pembangunan tempat ini biasanya di antara batas-batas bangunan kota atau dapat berdiri sendiri.

- Taman Rekreasi

Bentuk lainnya adalah taman rekreasi. Tempat ini diperuntukan untuk melakukan kegiatan rekreasi atau tamasya keluarga. Berbeda dengan taman kota, biasanya untuk masuk ke tempat ini dikenakan tarif tertentu.

- Taman Wisata Alam

Bentuk lainnya yaitu taman wisata alam atau sering disebut TWA. Sesuai dengan namanya, tempat ini memberikan ruang bagi masyarakat atau pengunjung untuk melakukan kegiatan wisata dengan objek berupa alam. TWA merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi berupa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang dapat digunakan untuk keperluan rekreasi atau pariwisata alam melalui pemanfaatan

ekosistem dan sumber daya alam dari tempat tersebut. Di Indonesia sendiri, taman wisata alam telah banyak didirikan di berbagai daerah. Salah satunya adalah TWA Angke Kapuk yang terletak di DKI Jakarta, lalu ada TWA Pangandaran di Jawa Barat, TWA Tanjung Tumpa di NTB, TWA Batu Putih di Sulawesi Utara, TWA Tirta Rimba Air di Sulawesi Tenggara, TWA Gunung Api Banda di Maluku, TWA Nabire di Papua, hingga di Papua Barat ada TWA Sorong dan TWA Pasir Putih. Selain itu, masih banyak lagi taman wisata alam di Indonesia yang dapat dijadikan menjadi destinasi wisata atau rekreasi alam.

- Taman Lingkungan Perumahan atau Perkantoran

Dalam jenis privat ada pula bentuk ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh perorangan atau pihak swasta. Contohnya yang terdapat di suatu permukiman atau perumahan serta gedung-gedung perkantoran atau gedung komersial. Biasanya taman lingkungan perumahan dan permukiman berbentuk taman yang juga dapat dijadikan sebagai tempat diskusi atau melakukan interaksi sosial lainnya. Di samping memberikan fungsi sosial budaya dan ekologi, fungsi yang paling diperlihatkan adalah fungsi estetika. Lingkungan perkantoran atau gedung komersial yang memiliki berbagai kegiatan melelahkan dan padat dapat diatasi dengan adanya taman yang memberikan kesan tenang dan nyaman untuk orang-orang tersebut.

- Hutan Kota

Ada juga dalam bentuk hutan kota. Sesuai dengan namanya, hutan kota didominasi oleh vegetasi-vegetasi berkayu dan berada di wilayah perkotaan. Tidak sama

dengan taman kota, hutan kota memiliki karakteristik strata tajuk yang berlapis atau banyak. Mulai dari tingkat pepohonan atau pohon-pohon tinggi hingga tumbuhan bawah serta berbagai penutup tanah lainnya seperti semak yang semuanya pada umumnya memiliki jarak tanam yang tidak teratur. Hutan kota memiliki struktur yang menyerupai hutan alam yang juga dapat menjadi habitat satwa. Tempat ini dapat menjadi simbol atau identitas suatu daerah. Misalnya dari vegetasi yang ada dan mendominasi di hutan kota tersebut menunjukkan bahwa spesies tanaman tersebut adalah endemik dari daerah tersebut sama halnya dengan satwa-satwa yang mendominasi di suatu hutan kota dapat menunjukkan bahwa satwa endemik daerah tersebut. Tempat ini memiliki beberapa macam bentuk yaitu bentuk jalur, mengelompok, dan menyebar. Selain itu, hutan kota juga dibedakan jenisnya berdasarkan fungsi dan peruntukkan lahan yaitu hutan kota tipe kawasan permukiman, kawasan industri, rekreasi, plasma nutfah, perlindungan, dan tipe pengamanan.

- Taman Pemakaman Umum (TPU)

Taman Pemakaman Umum (TPU) juga menjadi bagian dari kawasan ini. Mengingat kondisi tempat yang kritis untuk ruang terbuka hijau, maka salah satu cara mengatasinya adalah dengan memanfaatkan tempat pemakaman umum. Tempat ini adalah pemakaman jenazah bagi semua masyarakat tanpa membedakan golongan, suku, ras, agama, bangsa, atau kewarganegaraannya. Pada tempat ini, banyak sekali ditemukan vegetasi baik pohon ataupun rerumputan yang tumbuh secara alami maupun ditanam oleh manusia. Di sini juga dapat tercipta iklim mikro dan menjadi tempat penyerapan air serta menyediakan tempat yang

memiliki pemandangan indah. Oleh karena itu, taman pemakaman umum terhitung menjadi kawasan ruang terbuka hijau.

- Lapangan Olahraga

Selain itu, lapangan olahraga juga terhitung dalam kawasan ini. Lapangan olahraga merupakan suatu area atau lahan datar yang luas yang peruntukkannya untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas olahraga contohnya adalah lintasan lari dan lapangan golf. Tempat ini tergolong dalam kawasan ruang terbuka hijau karena menunjukkan area yang didominasi tumbuh-tumbuhan yang beberapa bagian areanya dimanfaatkan untuk keperluan aktivitas fisik.

- Jalur Hijau

Adapula jalur hijau yang merupakan daerah yang kaya akan vegetasi dan dibuat secara menjalur atau memanjang di sekitar lingkungan kota atau pemukiman masyarakat. Area ini berfungsi untuk tempat penyerapan air hujan. Di sini tidak boleh membangun rumah, gedung-gedung, atau bangunan lainnya. Salah satu bentuk jalur hijau adalah jalur hijau jalan yang memanjang dan berada di sisi jalan berfungsi sebagai sanitasi lingkungan.

- Sabuk Hijau

Selain itu ada sabuk hijau. Area ini berfungsi sebagai pembatas dengan lahan atau kawasan lain yang berfungsi untuk melindungi area tersebut. Salah satu contohnya adalah sabuk hijau yang berada di kawasan waduk. Sabuk hijau memiliki fungsi sebagai pembatas atau pemisah waduk dengan area lainnya serta perlindungan

waduk. Fungsi perlindungannya adalah fungsi ekologi yaitu untuk menjaga stabilitas tanah dan terjadinya erosi. Sabuk hijau harus dijaga dan dirawat dengan baik sebab sabuk hijau mempengaruhi tingkat kerusakan pada area yang dibatasinya. Jika sabuk hijau sudah mengalami kerusakan yang cukup tinggi, akan lebih mudah akses serta meningkatkan risiko kerusakan pada area yang dibatasinya.

- *Green Rooftop*

Pemanfaatan area lainnya sebagai ruang terbuka hijau adalah atap-atap bangunan. Hal ini untuk memaksimalkan kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan yang lahannya terbatas. Tumbuh-tumbuhan tersebut ditanam di atas atap bangunan. Tumbuhan ini pada umumnya ditanam dalam pot dan atapnya harus memiliki struktur yang kokoh. Taman atap ini dapat digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan interaksi dan diskusi sosial.

1.6 Definisi Konsep

Definisi Manajemen RTH Publik yaitu proses penyelenggaraan RTH Publik melalui kebijakan dan program-program yang dalam pengelolaannya melalui berbagai tahapan dari *planning*/perencanaan, *organizing*/pengorganisasian, *actuating*/pergerakan, *controlling*/pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis membuat operasionalisasi konsep sebagai bahan untuk bergerak di dalam mencari data. Adapun yang diamati antara lain *planning*/perencanaan, *organizing*/pengorganisasian, *actuating*/pergerakan,

controlling/pengawasan dalam rangka Manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus.

1.7.1 Manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus

Penulis dalam mendeskripsikan dan menganalisis manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus meneliti dari dimensi berikut ini :

a. *Planning*/Perencanaan

Dalam mengidentifikasi perencanaan yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, maka peneliti melihat beberapa hal di antaranya :

1. Visi, misi atau tujuan sasaran

Perencanaan yang baik ada visi, misi atau tujuan sasaran yang jelas. Selain adanya visi, misi atau tujuan sasaran yang jelas, pegawai harus mengetahui dan yang terpenting pegawai bisa memahami visi, misi atau tujuan sasaran organisasinya. Organisasi diharapkan dapat mencapai visi, misi atau tujuannya tersebut, karena sebuah organisasi dibentuk tidak lain untuk mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini, aspek-aspek yang akan dianalisis oleh penulis di antaranya :

- Adanya tujuan sasaran atau visi dan misi
- Kejelasan tujuan sasaran atau visi dan misi

- Pemahaman pegawai Dinas PKPLH Kabupaten Kudus terhadap visi, misi atau tujuan sasaran
2. Rumusan atau kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Kudus dalam manajemen RTH Publik
- Untuk mencapai tujuan atau sasaran dari RTH Publik diperlukan rumusan atau kebijakan yang jelas dan terarah dalam tahapan-tahapan perencanaan sebuah Manajemen RTH. Dalam penelitian ini penulis mencari informasi mengenai :
- Adanya rumusan atau kebijakan dalam Manajemen RTH Publik
 - Bagaimana proses perumusan Manajemen RTH Publik di Kabupaten Kudus
3. Target atau skala prioritas dalam Manajemen RTH Publik
- Di dalam Manajemen RTH Publik perlu adanya urutan kebutuhan atau skala prioritas. Skala prioritas ini merupakan urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan. Dalam penelitian ini penulis mencari informasi mengenai :
- Adanya target capaian pada Manajemen RTH Publik
 - Adanya kejelasan skala prioritas dalam Manajemen RTH Publik
4. Pemahaman Kebijakan Sebagai Landasan Manajemen RTH Publik
- Manajemen RTH Publik harus sesuai dengan kebijakan. Kebijakan yang menjadi pedoman dalam Manajemen RTH Publik berdasarkan dari berbagai sumber baik itu dari kebijakan pusat maupun daerah.

Kebijakan menjadi garis besar jalannya Manajemen RTH Publik agar dalam pelaksanaan pengelolaan maupun pengembangannya sesuai.

- Pemahaman pegawai Dinas PKPLH Kabupaten Kudus terhadap kebijakan sebagai landasan Manajemen RTH Publik
- Pemahaman *stakeholder* terhadap kebijakan sebagai landasan Manajemen RTH Publik

5. Faktor Pendorong dan Penghambat Manajemen RTH Publik

Faktor pendorong dan penghambat sangat penting di dalam perencanaan, karena faktor-faktor inilah yang menjadi bahan perencanaan untuk lebih baik lagi dari yang kemarin.

- Proses pengidentifikasian masalah/faktor penghambat
- Identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong
- Seperti apa pemanfaatan sumber daya (sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya financial maupun sarana prasarana)

b. *Organizing/Pengorganisasian*

Dalam mengidentifikasi pengorganisasian yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, maka peneliti melihat beberapa hal di antaranya :

1. Struktur yang Sesuai dengan Kebutuhan dan Kepentingan Saat Ini
Struktur organisasi penting diciptakan sesuai dengan situasi terkini, hal ini agar mempermudah manager atau atasan untuk menjalankan kepemimpinannya.

- Seperti apa struktur organisasi Dinas PKPLH Kabupaten Kudus
 - Sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan saat ini
 - Kejelasan alur kerja dan pertanggung jawaban
2. Keselarasan Koordinasi Antara Dinas atau Pihak Ke Tiga
- Koordinasi antar dinas perlu menjadi sorotan di dalam Manajemen RTH Publik di Kabupaten Kudus karena Taman atau Ruang Terbuka Hijau yang berhak membangun tidak hanya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, melainkan dinas lain juga turut membangun RTH di Kabupaten Kudus. Sehingga keselarasan koordinasi antar dinas ini harus tercipta dengan baik tak lain agar tujuan yang ditentukan dalam Manajemen RTH Publik dapat tercapai dengan yang baik.
- Seperti apa jalannya koordinasi
 - Pihak yang terlibat dalam koordinasi, dengan dinas lain atau dengan pihak swasta.
3. Kejelasan Pembagian Kerja dalam Tugas Operasional
- Pihak yang terlibat dalam Manajemen RTH di dinas PKPLH Kabupaten Kudus tentu tidak sedikit, jumlah yang tidak sedikit ini harus diatasi dengan kejelasan pembagian kerja dalam tugas operasionalnya.
- Pembagian kerja berdasarkan pengelompokkan tugas-tugas atas kegiatan yang sama
4. Penempatan Pegawai Sesuai dengan Kompetensinya

Karena setiap organisasi dalam mencari dan memilih calon-calon karyawan harus bisa mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penempatan pegawai bukan saja menjadi keinginan organisasi tetapi juga menjadi keinginan pegawai. Dengan demikian pegawai yang bersangkutan dapat mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sehingga pegawai dalam bekerja dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi.

- Kompetensi Sumber daya manusia yang terlibat dalam Manajemen RTH
- Seperti apa penempatan pegawai
- Ketepatan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya

5. Keselarasan Koordinasi antara Pimpinan dan Bawahan

Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu organisasi agar mempunyai keselarasan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, dan dimaksudkan agar para atasan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut.

- Seperti apa koordinasi antara pimpinan dan bawahan
- Kemampuan baik dalam mengarahkan oleh pimpinan
- Koordinasi dapat berjalan optimal untuk sesuai tujuan yang akan dicapai

c. *Actuating/Pergerakan /Implementasi*

Dalam mengidentifikasi proses pergerakan yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, maka peneliti melihat beberapa hal di antaranya :

1. Pemenuhan dan Pemahaman Terhadap *Standard Operating Procedure (SOP)*

Standard Operating Procedure atau (*SOP*) memiliki tujuan agar konsistensi dan tingkat kinerja dari pegawai atau sebuah unit kerja tetap terjaga. Selain itu *SOP* diperlukan agar peran dan fungsi di setiap posisi dalam organisasi jelas dimengerti sehingga tidak overlapping atau tumpang tindih.

- Adanya *SOP*
- Seperti apa *SOP*
- Pemahaman pegawai atas *SOP* yang berlaku

2. Pemberian Motivasi, Pujian, Teguran dan Sebagainya Kepada Bawahan Guna Membangun serta Meningkatkan Gairah Kerja Bawahan

Dalam *actuating* atau penggerakan ini perlu diberikannya perangsang berupa motivasi, pujian maupun teguran, insentif dan sebagainya. Dalam pemberian motivasipun harus diperhatikan dengan menyesuaikan terhadap hasil pengawasan dari proses kerja karena kondisi yang berubah-ubah.

- Adanya rangsangan gairah untuk kerja berupa motivasi, insentif dan sebagainya

- Seperti apa perwujudan dari rangsangan gairah kerja di Dinas
PKPLH Kabupaten Kudus
3. Pengembangan Potensi Pegawai untuk Memaksimalkan Kerjanya
- Salah satu hal yang membuat pegawai dalam suatu organisasi bekerja maksimal yaitu adanya pengembangan potensi diri yang baik. Dalam proses pengembangan sumber daya manusia ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya seberapa sering mengadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat), atau juga dilakukannya Study banding dengan organisasi lain.
- Adanya pengembangan potensi pegawai dalam memaksimalkan kerja pada Manajemen RTH Publik
 - Seperti apa kegiatan pengembangan yang dilakukan
4. Pimpinan Membimbing Bawahan untuk Memenuhi Ukuran – Ukuran Pelaksanaan Manajemen RTH
- Actuating* diberikan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan. Dengan kata lain *actuating* mempunyai arti menggerakkan orang-orang untuk bekerja dengan secara individu maupun kelompok bersama - sama untuk mencapai tujuan. Di dalam menggerakkan orang-orang tentu ada peran pimpinan yang membimbing bawahan.
- Pimpinan mempunyai kemampuan untuk membimbing bawahan di dalam Manajemen RTH Publik
 - Wujud bimbingan pimpinan ke bawahan.

5. Menimbulkan Partisipasi dari Semua Stakeholder agar tercipta Kondisi Yang Harmonis

Kegiatan Penggerakan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dari semua pihak yang berhubungan dengan pegawai dan atasan. Melihat Manajemen RTH Publik tidak hanya terhubung dengan internal organisasi maka perlu adanya upaya menimbulkan partisipasi dari semua *stakeholder*. Pengupayaan ini agar dalam keberjalanan Manajemen RTH Publik berada pada kondisi yang harmonis saling bersinergi sehingga tujuan yang ditentukan dari Manajemen RTH Publik dapat tercapai dengan baik.

- Upaya menimbulkan partisipasi semua stakeholder dalam Manajemen RTH Publik
- Upaya terhadap swasta
- Upaya terhadap masyarakat
- Terjaga dan berkembangnya RTH Publik di Kabupaten Kudus

d. *Controlling/Pengawasan*

Dalam mengidentifikasi proses pengawasan yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, maka peneliti melihat beberapa hal di antaranya :

1. Standar atau Ukuran Yang Ditetapkan Guna Melakukan Pengawasan
Control yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai. Pengawasan dapat

dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standard apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar.

- Adanya standar atau ukuran yang ditetapkan guna melakukan pengawasan
- Apa standar atau ukuran yang menjadi dasar kontrol Manajemen RTH Publik

2. Bentuk *Control*/Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Manajemen RTH Publik

- Waktu kontrol tersusun
- Bagaimana wujud kontrol
- Hasil kontrol harus bisa menjadi bahan evaluasi

3. Diikut Sertakannya Masyarakat di dalam Pengawasan Manajemen RTH Publik

Di dalam pengawasan Manajemen RTH Publikpun partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Partisipasi sosial bisa turut mengawasi secara langsung Manajemen RTH Publik.

- Pelibatan masyarakat dalam prosesi pengawasan Manajemen RTH Publik

- Bentuk pengikut sertaan masyarakat dalam Manajemen RTH Publik
 - Usaha menghadirkan atau mengikutsertakan masyarakat di dalam pengawasan
4. Pengidentifikasian Hambatan Pelaksanaan Manajemen RTH Publik
- Wujud pengidentifikasian
 - Apa saja hambatan yang dihadapi
5. Mengevaluasi Kinerja
- Langkah yang penting di dalam melakukan kontrol yaitu tahap mengevaluasi kinerja.
- Membandingkan antara rencana dengan kondisi di lapangan
 - Kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana
 - Bagaimana proses penentuan solusi atas hasil evaluasi Manajemen RTH Publik
 - Penciptaan solusi atau perubahan/perbaikan terhadap penyimpangan atau hambatan setelah proses evaluasi

1.7.2 Faktor yang Mendorong serta Menghambat dalam Manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus

Dalam Manajemen RTH Publik tentu banyak dinamika yang akan dihadapi. Dinamika tersebut bisa mempengaruhi pencapaian tujuan dari proses manajemen yang dilakukan. Hal yang mempengaruhi tersebut perlu diidentifikasi :

- a. Apa saja faktor pendorong Manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
- b. Apa saja faktor penghambat Manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus

Dalam mengidentifikasi faktor diatas, penulis melakukan penelitian pada berbagai tahapan dari *planning*/perencanaan, *organizing*/pengorganisasian, *actuating*/pergerakan, *controlling*/pengawasan

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Denzim dan Lincoln dalam Moleong (2007:5) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Moleong (2007:11) di dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Secara umum penelitian dalam Pasolong (2012:75) dapat digolongkan dalam tiga tipe penelitian, yaitu :

1. Penelitian Eksploratif (Penjajakan), yaitu suatu penelitian yang bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum mempunyai hipotesa, pengetahuan penelitian tentang gejala yang ingin diteliti masih kurang, sehingga penelitian penjajakan sering dilakukan sebagai langkah pertama untuk penelitian

penjelasan maupun penelitian deskriptif. Melalui eksploratif tersebut masalah penelitian dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan lebih terinci.

2. Penelitian Explanatory (Penjelasan), yaitu penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan, oleh karena itu dinamakan penelitian pengujian hipotesa yang telah dirumuskan atau testing research.
3. Penelitian Deskriptif (Penggambaran), yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya secara obyektif.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan fakta-fakta dan fenomena-fenomena bentuk, tahapan serta faktor yang mempengaruhi dalam Manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik oleh Dinas PKPLH Kabupaten Kudus.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat/lokasi peneliti melakukan penelitian. Situs penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus

1.8.3 Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian haruslah orang-orang yang benar-benar tahu dan memahami mengenai permasalahan yang ada. Di mana subjek penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi latar penelitian, dengan kata lain subjek penelitian merupakan informan atau orang yang memberikan informasi (Moleong, 2007:168). Di dalam menentukan informan teknik yang dipergunakan penulis adalah purposive sampling, artinya pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh key informan yaitu orang-orang yang mengetahui dengan benar atau orang-orang yang terpercaya. Alasan penelitian menggunakan teknik ini yaitu, agar langsung bisa memilih informan yang benar-benar tahu dan paham persoalan tersebut. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
2. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2018 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
4. Ketua LSM Semesta Kudus

5. Koordinator Pertamanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
6. Petugas Taman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus

1.8.4 Jenis Data

Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007:157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata- kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. Jenis- jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

c. Kata- Kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang- orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Di dalam melakukan wawancara tersebut tentunya peneliti harus bertanya dan kemudian mendengarkan apa saja yang dikatakan oleh informan, kemudian sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video, pengambilan foto atau film sehingga dapat dijadikan data untuk penelitian ini.

a. Sumber tertulis

Menurut Moleong (2007:159) menyatakan bahwa dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan

dokumen resmi. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber tertulis yaitu berupa buku, internet dan dokumen resmi. Dokumen resmi didapatkan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus dan bisa juga dari situs resmi instansi yang terkait.

b. Data statistik

Data Statistik Penelitian kualitatif sering menggunakan data statistik yang digunakan untuk sumber data tambahan. Data statistik dapat membantu memberikan gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian (Moleong, 2007:162). Data statistik yang digunakan di antaranya berupa data persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan luasnya dari tahun ke tahun

1.8.5 Sumber Data

Nugroho (2014: 115), yang mengutip dari Lofland dan lofland sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan tambahan, seperti dokumen dan lain sebagainya, termasuk di antaranya sumber data tertulis, dokumen rekaman suara, foto, dan data statistik. Sumber data yang digunakan dalam membantu penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan atau objek penelitian. Sumber dari data primer dalam penelitian adalah dengan wawancara langsung dengan informan yang mengetahui tentang Manajemen RTH Publik. Data tersebut dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada

informan. Di dalam penelitian ini data primer yang dipergunakan ialah data dan informasi dari Dinas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus

2. Data sekunder

Data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, data sekunder bersifat merupakan data yang bersifat mendukung pembahasan. Data ini diperoleh oleh peneliti melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder dapat berupa data dokumentasi, laporan-laporan, buku, majalah, jurnal dan sumber lain yang relevan. Adapun sumber data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder berupa data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu, pihak yang dimaksud ialah pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:186). Di dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, di mana peneliti dapat lebih bebas

melakukan wawancara. Peneliti tetap menggunakan *interview guide* (pedoman wawancara) yang dibuat sebelum peneliti terjun ke lapangan, menyiapkan beberapa pertanyaan dan jawaban. Hal ini untuk mengantisipasi apabila narasumber kurang aktif di dalam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Di dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan para narasumber yang telah penulis tentukan.

2. Dokumentasi

Guba dan Lincoln dalam Moleong (2007:216) mendefinisikan bahwa dokumen ialah setiap bahan tertulis maupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumentasi ini merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis atau melihat dokumen – dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Bentuk dokumen yang dijadikan bahan dalam studi dokumentasi adalah dokumen pribadi dan dokumen resmi.

3. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan melihat atau mengamati langsung kondisi latar (objek) dari penelitian untuk menemukan fakta-fakta di lapangan, data melalui observasi masih bersifat data awal yang kemudian harus diperdalam melalui teknik pengumpulan data lain seperti wawancara. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2008: 64) data observasi sering dikumpulkan dengan menggunakan bantuan alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (seperti proton dan plankton) dan benda yang letaknya sangat jauh seperti luar angkasa sekalipun dapat diamati

dengan jelas. Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2008: 64) mengklasifikasikan observasi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Observasi Partisipatif

Dalam observasi ini, peneliti ikut berinteraksi secara intens dan mendalam serta ikut di dalam kegiatan sehari-hari dari informan yang dituju, peneliti juga merasakan suka duka dari apa yang dialami oleh informan sembari mengumpulkan data. Keunggulan dari observasi ini data yang di peroleh lebih valid dan mendalam.

2. Observasi Terus terang atau Tersamar

Pada jenis observasi ini, peneliti akan berterus terang kepada informan bahwa kedatangannya adalah untuk melakukan observasi, jadi dari awal informan sudah mengetahui tentang aktivitas peneliti. Tetapi suatu ketika peneliti harus tidak terus terang dan tersamar dalam observasinya untuk mendapatkan data yang sifatnya rahasia.

3. Observasi Tak Berstruktur

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Fokus penelitian akan berkembang seiring penelitian berlangsung. Kalau fokus penelitian sudah jelas seperti penelitian kuantitatif, maka observasi dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik observasi terus terang dan tersamar, karena peneliti langsung melakukan pengamatan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten

Kudus, peneliti juga berharap akan mendapatkan data yang bersifat rahasia melalui teknik observasi tersamar.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data yang di peroleh dari buku-buku, majalah, tulisan-tulisan serta referensi lain yang relevan dengan tujuan penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis Data menurut Bodgan dalam Sugiyono (2008:244) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Ada beberapa model analisis data kualitatif yang bisa dijadikan pilihan dalam melakukan penelitian, salah satunya adalah Model Miles dan Huberman. Menurut Model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 246-253) ada beberapa langkah-langkah analisis data, yaitu :

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Nantinya data yang

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data Display

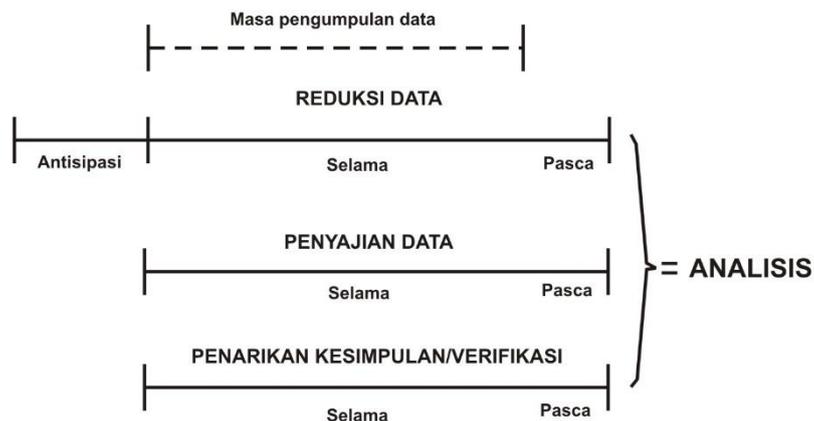
Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion Drawing/ Verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang dan setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Berdasarkan seluruh analisis diatas, peneliti melakukan rekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi, dan argumentasi mengenai manajemen Ruang Terbuka Hijau Publik Kabupaten Kudus.

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut ini

Gambar 1.2
Langkah-Langkah Analisis



1.8.8 Kualitas Data

Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan kredibilitas dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Banyak ahli yang memaparkan berbagai cara tentang penggunaan teknik triangulasi. Pendapat beberapa ahli tentang teknik triangulasi, dan menyimpulkan penggunaan teknik triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data triangulasi (triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut (Moleong, 2007:330-331) :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah/ tinggi, orang berada, dan pemerintahan
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan